



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCAPAIAN PERJUANGAN GERAKAN SOSIAL *LAS*
MADRES DE LA PLAZA DE MAYO MENUNTUT
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH SIPIL DALAM
KASUS PELANGGARAN HAM *DIRTY WAR* DI ARGENTINA
(1983-2007)**

SKRIPSI

JOHANAN M

0706283185

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPOK

DESEMBER 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENCAPAIAN PERJUANGAN GERAKAN SOSIAL *LAS*
MADRES DE LA PLAZA DE MAYO MENUNTUT
PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH SIPIL DALAM
KASUS PELANGGARAN HAM *DIRTY WAR* DI ARGENTINA
(1983-2007)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik

JOHANAN M

0706283185

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

DEPOK

DESEMBER 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Johanan M
NPM : 0706283185
Tanda Tangan : 
Tanggal : 14 Desember 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Johanan M

NPM : 0706283185

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Perjuangan Gerakan Sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* Menuntut Pertanggung Jawaban Pemerintah Sipil dalam Kasus Pelanggaran HAM *Dirty War* di Argentina (1983-2007)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

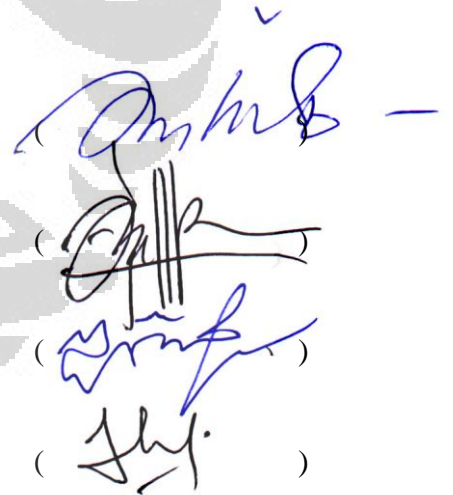
DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Drs. Nur Iman Subono, M.Hum.

Penguji : Hurriyah, S.Sos, IMAS

Ketua Sidang : Cecep Hidayat, S.IP, IMRI

Sekretaris Sidang : Ikhsan Darmawan, S.Sos, M.SI



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Desember 2011

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya haturkan kepada Tuhan Yesus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Drs. Nur Iman Subono, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. *I can't even thank you enough for all these things;*
2. Papa Fransiskus Xaverius Lumban Toruan, yang cinta dan dukungannya tidak pernah habis dimakan zaman. *Everything I'm done, i dedicated for you papa, cause everytime you said "papa bangga sekali sama kamu" i feel like I'm the happiest daughter on earth.* Mama Anastasia Sri Budiarti *and her ride* yang tidak kenal lelah mengantar-jemput saya setiap harinya, yang selalu *covering my (financial) problems. Behind your petiteness, you are my TRUE patron. I really love you both ☺*
My best brother in the universe, Antonius Anggi Maharsi. Sadar atau tidak but you taught me many things in my life. We might talk rarely, but doesn't mean you out of my radar B)
My cute little spirits, Ariq Aramintha Nabagakan and Abigail Hamonangan yang selalu sukses membuat saya merindukan rumah.
Sepupu-sepupu dari dinasti Sihombing Lumban toruan generasi ke-18: Bang Alex, Bang Tommy, Kak Emma, Kara, Gabriel, Taruli, Linggom. (alm.) ompung dolly dan ompung boru, inang tua, bapak tua, inang uda, bapak uda, tulang, amang boru, naboru siapapun dan dimanapun kalian berada serta (alm.) mbah, tante-tante, om-om dan sepupu-sepupu dari keluarga mama.

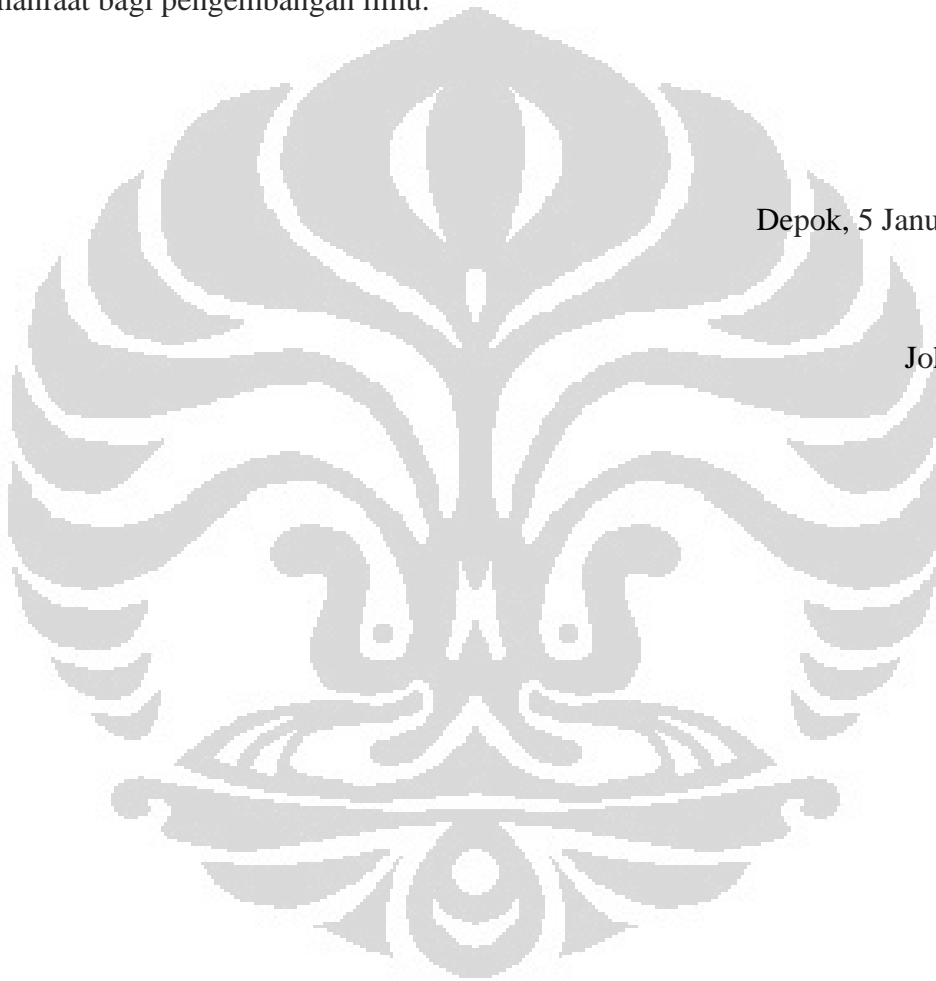
3. Mas Cecep, mbak Hurriyah dan mas Ikhsan yang telah menyediakan waktu untuk datang dan menguji skripsi saya. Terimakasih atas masukan dan pengetahuan yang telah diberikan sebelum sidang maupun saat sidang.
4. Kepada segenap dosen Departemen Ilmu Politik, antara lain Cecep Hidayat & Hurriyah, serta dosen-dosen lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.
5. Keluarga Ilmu Politik angkatan 2007: *My two beautiful ladies* CHACHA and RENNY, ketua angkatan tercinta UCUP, WILLIAM yang selama ini sukses jadi tebengan Kelapa Gading-Depok and *vice versa*, si ganteng KEVIN, EBEN, BOJAI, AUL, ANDREE (kemana aja cyiini?), OSCAR, FUAD, FEBARI, WIDHA, TIKA, AMAL, PUSPA, IKHSAN, ANIA, DEVY, FILDZAH, VICI, WIKE, UCOK, ARDHAN, RIFA, WANDA, SADALI, BENNY, RAJAB, RIJAL, AMEL, dan mantan anak politik tersayang MIA!
You guys will always be in my heart ☺
6. Kakak-kakak senior Ilmu Politik 2005 dan 2006 juga adik-adik Ilmu Politik 2008 dan 2009 serta teman-teman dari jurusan lain yang kerap menyemangati saya.
7. Tempat saya bernaung selama setahun belakangan dan mendapat banyak sekali ilmu, yaitu PT 3 Warna Citra dan segenap isinya: Om Wiwied, Tante Yanthi, Tante Tety, Mbak Yanti, Mas Ipul (*Favorite crew ever!*), Mas Ocha dan amunisinya, Mas Likin, Mas Iponk, Mas Munir, Mas Atok.
8. *My loveliest gays on earth*: #genggesgetaway yang terdiri dari Agnes Saulina Sitorus (*my best mate from hi-school*), *my two favorite virgos* Emily Laras Permata and Yesika Agustina Manik, si perempuan tapi bencong Frida Tumakaka, Kitty Stephanie Hutabarat (sesama korban kecelakaan ya neyk), Magya Widjanarko (perempuan paling *cool* se...Prima), dan sesama pejuang skripsi saya *for the last couple months* Winnie Ariane. Tidak lupa Gardenia boulevard Apartment Tower A 1119 dan 1517 tempat kami selama ini bernaung.
9. *My pretty FISIP mates*, Ambrosia Christie Gabriela Atmadja and Dhanisa Nurfira ☺

10. Teman-teman alumni SMA Fons Vitae 1 Marsudirini yang dulu sama-sama kabur tiap kali suster kepala sekolah lewat.
11. *Last but not least*, Sashilia Arministiani Gandarum yang menemani selama sidang berlangsung. *I just can say... ILY and even going stronger everyday* :p

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 5 Januari 2012

Johan M



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Johanan M
NPM: : 0706283185
Program Studi : Ilmu Politik
Departemen : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perjuangan Gerakan Sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* Menuntut Pertanggung Jawaban Pemerintah Sipil dalam Kasus Pelanggaran HAM *Dirty War* di Argentina (1983-2007)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 14 Desember 2011

Yang menyatakan



(Johanan M)

ABSTRAK

Nama : Johanan M
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Perjuangan Gerakan Sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* Menuntut
Pertanggung Jawaban Pemerintah Sipil dalam Kasus Pelanggaran
HAM *Dirty War* di Argentina (1983-2007)

Skripsi ini membahas perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil di Argentina yang difokuskan sampai pada tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai *Dirty War*, *Las Madres de la Plaza de Mayo*, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder. Penelitian penulis akan perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara.

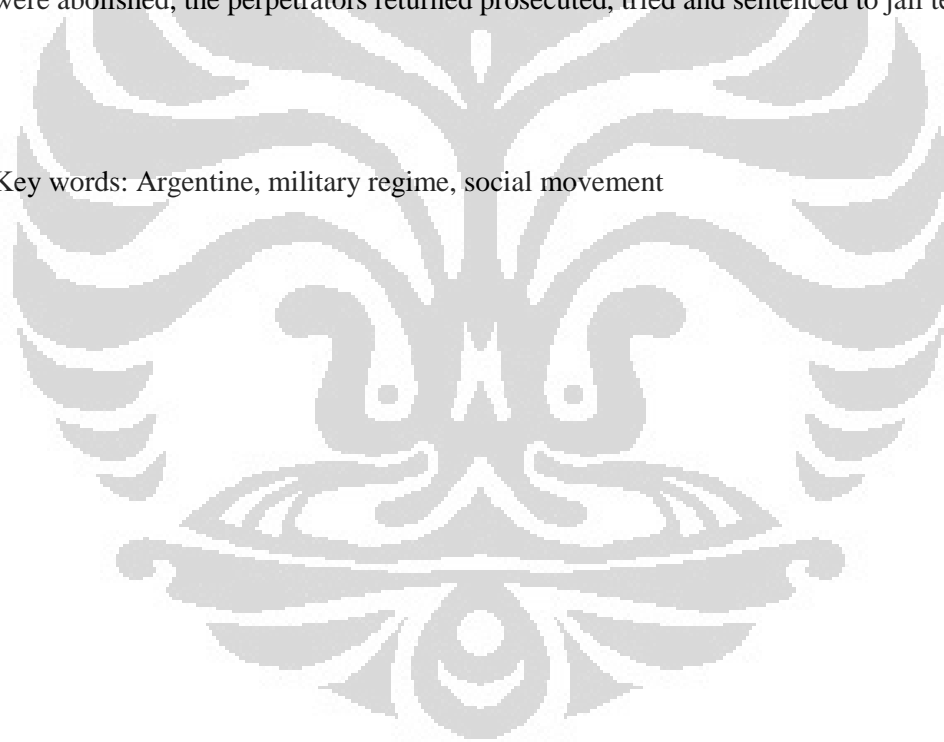
Kata kunci: Argentina, junta militer, gerakan sosial

ABSTRACT

Name : Johanan M
Study Program : Political Science
Title : Struggles of *Las Madres de la Plaza de Mayo* Social Movement in Demanding Accountability of Civil Government in Dirty War Case of Human Right Violence in Argentine (1983-2007)

This thesis examines struggles of *Las Madres de la Plaza de Mayo* focused in demanding accountability for civilian government that is focused in Argentina until 2007. The type of descriptive analytical research that used by the author is the study of documentation and literature so that every data of Dirty War, *Las Madres de la Plaza de Mayo*, and the accountability of the governments of Argentina after the military regime is obtained a secondary data. The research of *Las Madres de la Plaza de Mayo* focused until 2007. That year was a culmination of *Las Madres de la Plaza de Mayo* that occurred in the reign of Nestor and Cristina Filchner Filchner. Under their leadership, impunity laws were abolished, the perpetrators returned prosecuted, tried and sentenced to jail terms.

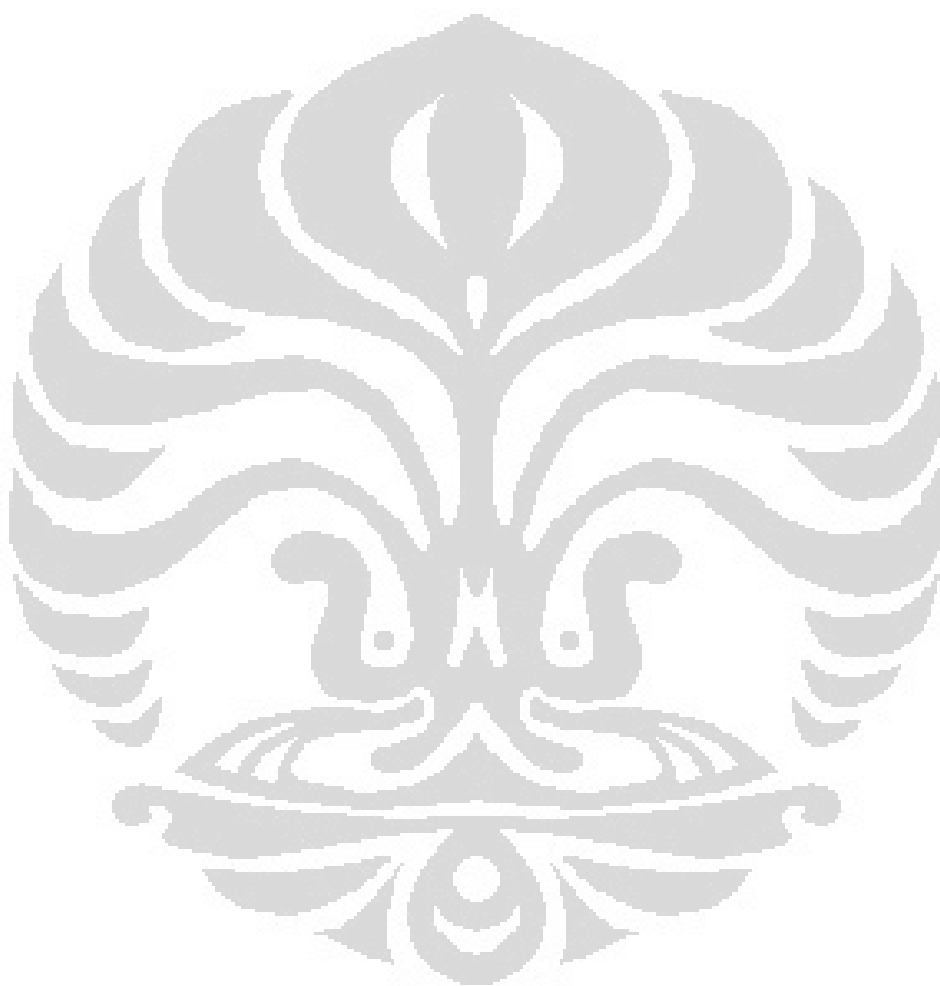
Key words: Argentine, military regime, social movement



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Pemikiran	6
1.5 Alur Berpikir.....	13
1.6 Asumsi	14
1.7 Metode Penelitian	15
1.8 Sistematika Penulisan	15
BAB 2 KONTEKS SOSIAL HISTORIS MUNCULNYA <i>LAS MADRES</i> <i>DE LA PLAZA DE MAYO</i>.....	17
2.1 <i>Dirty War</i> sebagai Penyebab Terbentuknya Gerakan <i>Las</i> <i>Madres de la Plaza de Mayo</i>	17
2.2 Sejarah <i>Las Madres de la Plaza de Mayo</i>	23
2.3 Perjuangan Awal Gerakan <i>Las Madres de la Plaza de Mayo</i>	26
2.4 Koalisi <i>Las Madres de la Plaza de Mayo</i> dengan Organisasi- organisasi Lainnya	31
2.4.1 <i>Housewife's Organization</i>	33
2.4.2 Kaum Feminis	34
BAB 3 PENCAPAIAN PERJUANGAN <i>LAS MADRES DE LA PLAZA</i> <i>DE MAYO</i> MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH SIPIL DALAM KASUS PELANGGARAN <i>HAM DIRTY WAR</i>.....	37
3.1 Perjuangan <i>Las Madres de la Plaza de Mayo</i> sebagai Gerakan Sosial yang Mengangkat Isu HAM	37
3.2 Pencapaian <i>Las Madres de la Plaza de Mayo</i> dari 1983-2007.....	44
3.2.1 Masa Pemerintahan Raul Alfonsin (1983-1989).....	46
3.2.2 Masa Pemerintahan Carlos Menem (1989-1999)	49

3.2.3 Masa Pemerintahan Fernando de la Rúa (1999-2001) dan Lima Presiden dalam 15 Hari (20 Desember 2001-3 Januari 2002)	53
3.2.4 Masa Pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Kirchner (2003-2007)	56
BAB 4 KESIMPULAN	60
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat Junta Militer berkuasa di Argentina (1976-1983) terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama *Dirty War*¹ dimana terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara masif, mulai dari penculikan, penindasan, sampai dengan pembunuhan massal. Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa total dari korban kasus pelanggaran HAM sebanyak 30.000 jiwa.² Hal ini dilakukan oleh rezim militer dengan alasan untuk menjaga keamanan nasional, mencegah kelompok subversif yang dianggap menjadi ancaman negara. Bahkan selama periode waktu tersebut, segenap sektor di dalam masyarakat yang dianggap mencurigakan bagi pemerintah, dihilangkan secara paksa. Korban penghilangan paksa tersebut antara lain anggota serikat buruh, kaum muda di serikat-serikat pelajar maupun mahasiswa, para wartawan, para psikolog dan sosiolog, kaum pasifis, para rohaniwan (suster atau biarawan). Bahkan kerabat dari orang-orang tersebut ikut menjadi korban. Begitu juga dengan gerakan-gerakan sosial masyarakat sipil dan berbagai bidang kehidupan masyarakat dikontrol oleh pemerintah. Mereka yang menjadi korban penghilangan paksa dianggap oleh Junta Militer mempunyai mata pencaharian yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Situasi ini jelas menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang semakin meluas. Hal inilah yang memicu terbentuknya gerakan sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo*, sebuah gerakan sosial wanita di Argentina yang mulai beroperasi sejak 30 April 1977. Para ibu paruh baya tersebut menuntut pemerintah atas

¹ Istilah *Dirty War* lazimnya mengacu pada program terorisme negara dalam menanggapi apa yang dipahami sebagai subversi sayap kiri yang dituduh mengancam kestabilan negara. Istilah ini juga seringkali digunakan khususnya untuk mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan selama kurun waktu 1977-1983 oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla di Argentina.

² "Ibu-ibu Plaza de Mayo, Argentina," diperoleh dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=las%20madres%20de%20la%20plaza%20de%20mayo%20perang%20kotor&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kontaras.org%2Fpers%2Fteks%2FLampiran%25202%2520Plaza%2520de%2520Mayo.pdf&ei=u1y-TvzPG9HprOedyLzfAQ&usg=AFQjCNEITrxIGvqkTXktaJciIOXtz5fYhA&sig2=aRSCInt0WoGxrjzHcMjptA>, Internet, diakses 3 September 2010.

hilangnya anak-anak mereka. Gerakan yang telah meluas dan menjadi sumber inspirasi dari gerakan politik korban di seluruh dunia ini dikenal dengan sebutan *Las Madres de la Plaza de Mayo*. Gerakan yang dimotori oleh ibu-ibu korban penghilangan secara paksa tersebut telah menjadi ikon perjuangan dan perlawanan masyarakat sipil Argentina lebih dari 30 tahun. Gerakan ini pada awalnya didirikan oleh 14 orang ibu-ibu yang jumlah anggotanya semakin lama semakin bertambah, bahkan mencapai ribuan anggota.

Uniknya ketika resistensi publik direpresi oleh rezim militer, atas dukungan internasional, terutama Amerika Serikat yang pada saat itu di bawah pimpinan Jimmy Carter, para ibu tersebut (ada pula yang sudah berstatus nenek) selain memiliki semangat luar biasa juga dengan cerdasnya mempersiapkan suatu strategi yang unik. Mereka dengan sabar, tekun dan persisten melakukan aksi/kampanye damai yang inovatif dengan berjalan berdua-dua mengelilingi alun-alun Plaza de Mayo yang persis terletak di depan pusat kekuasaan Junta Militer, Istana Casa Rosada dan Katedral Kota, di tengah-tengah Buenos Aires.³ Lokasi ini selalu penuh dengan turis, pedagang, dan mereka yang lalu lalang ke daerah bisnis di sekitarnya, atau tempat burung-burung merpati dan orang-orang yang sedang santai dengan duduk di bangku-bangku taman beserta hamparan taman bunga yang indah. Dari pemilihan lokasinya, nampak bahwa tujuan gerakan ini yakni menarik perhatian banyak orang, baik dalam maupun orang asing, kalangan swasta maupun pemerintah.⁴ Kelompok ini berjuang dan mempengaruhi opini masyarakat, dan menjadi kekuatan besar yang membongkar kekerasan politik di Argentina yang terjadi pada tahun 1976-1983. Metode perjuangan mereka yang awalnya dianggap sepele ternyata dapat menjatuhkan pemerintahan militer yang berkuasa pada saat itu. Dianggap sepele karena mereka hanyalah ibu-ibu rumah tangga biasa dalam suatu masyarakat yang patriarkis dan nyaris tidak memiliki latar belakang kemampuan politik yang memadai. Diperengkapi dengan berbagai simbol dan atribut sederhana, kerudung kepala putih dengan bordiran nama-nama keluarga mereka yang hilang, mereka selalu hadir di Plaza de Mayo setiap hari Kamis sore selama kurang lebih setengah jam. Lewat gerakan simbolik itu pula

³ *Ibid.*

⁴ Nur Iman Subono, “‘Las Madres de la Plaza de Mayo’, Peranan Politik Ibu di Argentina,” *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Vol. 16 (2001), hlm. 52.

jeritan hati pengalaman subjektif mereka bertransformasi menjadi suara perlawanan yang meski tak terdengar selalu mengusik eksistensi penguasa tiran disana. Yang lebih uniknya lagi, meski konteksnya adalah masyarakat yang patriarkis, ibu-ibu tersebut bisa mentransformasi peran tradisional (domestik) mereka sebagai ibu rumah tangga menjadi figur publik yang berjuang demi kepentingan publik nasional yang lebih luas.

Pada tahun 1983, Argentina kembali menganut sistem demokrasi, tetapi perjuangan gerakan perempuan ini tidak berhenti sampai disitu. Pasca jatuhnya rezim militer di Argentina, ibu-ibu ini tetap berupaya memperjuangkan penegakan Hak Asasi Manusia di Argentina. Berbagai upaya dilakukan oleh mereka, mulai dari aksi diam mengelilingi piramida di depan Plaza de Mayo sampai dengan mencari dukungan luar negeri, salah satunya dengan bergabung dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia di Eropa dan Amerika Serikat.

Pemerintahan baru yang terbentuk nyatanya masih di bawah pengaruh militer, dari pemerintahan Raul Alfonsin, Carlos Menem, sampai pada pemerintahan Fernando de la Rúa. Raul Alfonsin yang menjabat sebagai presiden mencabut hukum amnesti militer yang berkuasa dan mulai membentuk *National Commission on Dissapeared People* (Komisi Nasional terhadap Penghilangan Orang) dalam rangka investigasi kejahatan *Dirty War*.⁵ Walaupun begitu, Raul Alfonsin dianggap tidak serius dalam menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM pada peristiwa *Dirty War*. Anggapan ini muncul berkaitan dengan dua undang-undang impunitas yang dikeluarkannya, yakni *La Ley de Punto Final* (*The Full Law Stop*) dan *La Ley de Obediencia Debida* (*The Law of Due Obedience*).⁶

Berbagai upaya dilakukan oleh *Las Madres*, dimulai dengan mencari dukungan internasional agar secara bersama-sama menekan pemerintah Argentina untuk menghapus undang-undang impunitas, demonstrasi bersama dengan organisasi HAM lainnya, sampai mengumpulkan petisi mencari dukungan dari orang-orang yang peduli akan keadilan.

⁵ Jo Fisher, *Out of the Shadows: Women, Resistance and Politics in South America* (Latin America: BUREAU, 1993), hlm. 102.

⁶ Mimi Doretti, "Equipo Argentino de Antropologia Forens (EAAF)," Annual Report, 2002, diperoleh dari www.eaaf.org.ar, Internet, diakses 2 Februari 2011.

Gerakan *Las Madres* melakukan berbagai advokasi yang tidak saja memiliki fokus khusus pada peristiwa penghilangan orang secara paksa selama periode *Dirty War*, namun juga menjadi bagian dari perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial lintas negara. Hal ini telah berlangsung selama 32 tahun sejak berdirinya gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*. Mereka mampu menarik empati masyarakat, tidak hanya masyarakat Argentina namun juga komunitas internasional. *Las Madres* bertransformasi menjadi pejuang HAM yang menjadi sumber inspirasi para korban kasus pelanggaran HAM, gerakan emansipasi politik perempuan, gerakan demokrasi, aktivis politik rohaniwan para advokat HAM, seniman hingga para atlet olahraga di seluruh dunia. Perlawanan *Las Madres* terhadap junta militer yang berkuasa juga menginspirasi suatu reformasi institusional dan instrumentasi di berbagai badan-badan HAM internasional dan regional. Prinsip-prinsip hak korban kemudian semakin sempurna bentuk normatifnya berkat perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo*.

Penelitian penulis akan perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* difokuskan sampai pada tahun 2007. Tahun tersebut merupakan puncak dari perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* yang terjadi pada masa pemerintahan Nestor Filchner dan Cristina Filchner. Dibawah pimpinan mereka, undang-undang impunitas benar-benar dihapuskan, para pelaku kembali dituntut, diadili dan divonis dengan hukuman penjara.

1.2 Perumusan Masalah

Kehidupan sosial dan politik di Argentina tidak pernah stabil, akibat dari intensitas pergantian rezim di Argentina yang dinilai cukup tinggi. Bahkan sejak tahun 1930, kudeta merupakan hal yang sangat lazim terjadi di Argentina dan tidak ada kekuasaan demokratis yang sungguh-sungguh berusia lama. Sedangkan kudeta yang berada di bawah kepemimpinan Jenderal Jorge Rafael Videla menciptakan teror politik berkepanjangan yang dikenal sebagai periode *Dirty War*. Suasana yang dibangun oleh kudeta militer ini jelas menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang semakin meluas. Dari sinilah kemudian warga negara Argentina selaku orang tua dari korban penghilangan secara paksa membentuk

gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*. Mereka meminta pemerintah untuk mengembalikan anak-anaknya yang dihilangkan secara paksa. Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* lambat laun menjadi besar, anggotanya mencapai ribuan walaupun salah satu pendirinya, Azucena Villaflor de Vicenti juga menjadi korban penghilangan paksa bersama beberapa anggota lain.⁷

Fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah perjuangan dari gerakan yang dimotori oleh ibu-ibu Argentina ini sampai tahun 2007, maka penelitian diberi judul “Pencapaian Perjuangan Gerakan Sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* Menuntut Pertanggung Jawaban Pemerintah Sipil Dalam Kasus Pelanggaran HAM *Dirty War* di Argentina (1983-2007)”.

Pertanyaan dari penelitian ini adalah: **bagaimana perjuangan gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil terkait pelanggaran HAM pada peristiwa *Dirty War*?** Peneliti juga mencari tahu pencapaian gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* sehingga dapat dikatakan sukses dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil terkait pelanggaran HAM pada peristiwa *Dirty War*.

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang, terlihat bahwa tujuan dari penelitian penulis adalah untuk menggambarkan secara umum bagaimana gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* dengan peran tradisional mereka sebagai ibu rumah tangga menjadi figur publik yang berjuang demi kepentingan publik nasional yang lebih luas. Penelitian juga akan difokuskan pada sejauh mana kontribusi yang diberikan oleh gerakan tersebut terhadap pertanggungjawaban pemerintah pasca pelanggaran HAM yang terjadi pada periode *Dirty War* di Argentina.

Selain itu, penulis juga mencoba menghadirkan perjuangan yang tidak mengenal rasa takut terhadap satu bentuk kekuasaan politik, yang telah menciptakan pertentangan begitu dahsyat di tengah masyarakat Argentina, dan

⁷ “Menolak Impunitas: Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan HAK ASASI MANUSIA Melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-prinsip Hak Korban,” *Kontras*, 2005, hlm. V

memberikan inspirasi sebagai gerakan kolektif korban dalam menuntut keadilan di seluruh dunia termasuk juga di Indonesia.

Signifikansi penelitian merupakan signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu atau kegunaan teoritis. Oleh karena itu, penelitian penulis mengenai fenomena gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran bagi seluruh masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian dan sebagai dasar argumentasi untuk menjawab pertanyaan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian yang ideal adalah yang sesuai dengan kerangka pemikirannya. Teori-teori yang dipaparkan diharapkan dapat membantu penulis di dalam penelitiannya sebagai landasan analisis suatu kasus secara mendalam.

Agar lebih mudah memahami dinamika penelitian, penulis menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan, antara lain konsep HAM secara universal, gerakan sosial, wilayah privat dan wilayah publik, serta elit politik.

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁸ Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Sedangkan dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dihilangkan oleh negara. Menurutnya, HAM merupakan sesuatu yang bersifat kodrati.⁹

⁸ A. Ubaedillah, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 252.

⁹ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration* (Oxford, 1964), hlm. 3.

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wiena pada tahun 1993 mengembangkan satu perspektif yang lebih luas atas Hak Asasi Manusia, dan akibatnya juga pada pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pengakuan kuat atas Hak Asasi Manusia yang terdiri dari hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial yang tidak bisa dipilah-pilah, saling berkaitan dan saling bergantung juga ditujukan pada tanggung jawab dari berbagai pelaku swasta, bukan hanya negara.¹⁰

Mastricht Guidelines yang mengelaborasi prinsip-prinsip untuk mengarahkan implementasi *The International Covenant on Social and Cultural Rights*, telah membantu menganalisis lebih lanjut mengenai konsep pelanggaran hak asasi baik bagi pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap penekanan pada peran negara. *Mastricht Guidelines* dihasilkan dalam satu pertemuan dari lebih dari 30 ahli yang diselenggarakan di Maastrich 22-26 Januari 1997. Tujuan pertemuan itu adalah untuk mengelaborasi prinsip-prinsip Limburg tentang implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dilihat sebagai sifat dan lingkup pelanggaran hak-hak, ekonomi, sosial dan budaya dan tanggapan dan pemulihan yang tepat. Arahan *Mastricht* ini menyediakan dasar utama bagi identifikasi pelanggaran HAM. Arahan ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat *acts of commission* (tindakan untuk melakukan) oleh pihak negara maupun *acts of omission* (tindakan untuk tidak melakukan tindakan apapun) oleh negara. Pelanggaran HAM oleh pihak negara, baik berupa *acts of commission* maupun *acts of omission*, dapat dilihat dalam hal kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, yaitu:¹¹

1. Kewajiban untuk menghormati: kewajiban menghargai ini menuntut negara, dan semua organ dan agen aparatnya untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:
 - a. Pembunuhan di luar hukum (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas).

¹⁰ M.M. Billah, *Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 7-9.

- b. Penahanan serampangan (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas).
 - c. Pelanggaran serikat buruh (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat).
 - d. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu).
2. Kewajiban untuk melindungi: kewajiban untuk melindungi ini menuntut negara dan agen aparatnya melakukan tindakan yang memadai guna melindungi warga individu dari pelanggaran hak-hak individu atau kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh dari jenis pelanggaran ini adalah *acts of omission* seperti:
- a. Kegagalan untuk bertindak, ketika satu kelompok tertentu menyerang kelompok lain.
 - b. Kegagalan untuk memaksa perusahaan untuk membayar upah yang tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi: kewajiban untuk memenuhi ini menuntut negara melakukan tindakan yang memadai untuk menjamin setiap orang di dalam peluang yurisdikasinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan yang telah dikenal di dalam instrumen hak asasi dan tidak dapat dipenuhi oleh upaya pribadi. Contoh dari jenis ini adalah *acts of commission* seperti:
- a. Kegagalan untuk memenuhi sistem perawatan kesehatan dasar.
 - b. Kegagalan untuk mengimplementasikan satu sistem pendidikan gratis pada tingkat primer.

Diantara aktor-aktor non-negara yang ada, gerakan sosial merupakan salah satu aktor penting yang menjalankan agenda politik internasional lewat upaya-upaya yang dilakukannya guna mencapai suatu maksud dan tujuan, memecahkan persoalan, atau mencari jalan keluar. Pada hakikatnya, gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari masyarakat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum

dan kelembagaan negara. Gerakan sosial juga bisa dilihat sebagai upaya bersama masyarakat yang hendak melakukan pembaharuan atas situasi dan kondisi sosial politik yang dipandang tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi *status quo*.

Menurut Turner dan Killian, secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri.¹² Sedangkan Neidhardt dan Rucht menyatakan, sebuah gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan.¹³ Biasanya, gerakan ini melibatkan cara-cara yang tidak terlembagakan seperti pawai, demonstrasi, protes untuk mendukung atau menentang suatu perubahan sosial. Gerakan sosial melibatkan sejumlah orang yang cukup banyak dan biasanya berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran sekelompok orang atas kepentingannya.

Gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang lahir dari dan atas prakarsa masyarakat dalam usaha menuntut perubahan dalam institusi, kebijakan atau struktur pemerintah. Perubahan itu biasanya karena kebijakan pemerintah tidak sesuai lagi dengan konteks masyarakat yang ada atau kebijakan itu bertentangan dengan kehendak sebagian rakyat. Ditandai oleh penggunaan cara-cara diluar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara. Karena gerakan sosial itu lahir dari masyarakat maka kekurangan apapun di tubuh pemerintah menjadi sorotannya.¹⁴ Lain halnya apabila gerakan sosial itu bernafaskan ideologi. Jika keadaannya demikian, maka tuntutan tak terbatas pada perubahan institusional namun juga perubahan fundamental berupa perbaikan dalam pemikiran dan kebijakan dasar pemerintah.

¹² Ralph H. Turner dan Lewis M. Killian, *Collective Behavior* (NJ: Prentice Hall, 1957), hlm. 308.

¹³ Friedhelm Neidhardt dan Dieter Rucht, "The Analysis of Social Movements: The State of the Art and Some Perspective for Further Research," dalam *Research on Social Movements, The State of the Art in Western Europe and the USA*, ed. Dieter Rucht, (Frankfurt A.M.: Campus), hlm. 452-453.

¹⁴ Yu-Wen Jen, *The Taiping Revolutionary Movement* (London: Yale University Press, 1973), hlm. 71.

Menurut Mario Diani, ada empat unsur utama gerakan sosial. Pertama, jaringan yang kuat tetapi interaksinya bersifat informal atau tidak terstruktur. Dengan kata lain, terdapat ikatan ide dan komitmen bersama diantara para anggota dan konstituen gerakan tersebut meskipun masing-masing anggota diklasifikasikan berdasarkan latar belakang profesi dan kelas sosial. Kedua, terdapat sharing keyakinan dan solidaritas antar anggota. Ketiga, ada aksi bersama dengan membawa isu yang bersifat konfliktual. Ini berkaitan dengan desakan terhadap perubahan tertentu. Keempat, aksi tuntutan itu bersifat kontinuitas.¹⁵

Menurut Peter Burke, seorang sosiolog Amerika, ada dua tipe gerakan sosial. Pertama, gerakan sosial untuk memulai perubahan. Kedua, gerakan sosial yang dilakukan sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi.¹⁶ Jenis gerakan sosial lainnya yaitu gerakan protes. Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Gerakan protes merupakan jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara berkembang. Gerakan protes itu sendiri masih dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu gerakan reformasi atau gerakan revolusioner. Sebagian besar gerakan protes adalah gerakan reformasi karena visi dan misinya untuk mencapai reformasi pada batas tertentu, tidak untuk merombak ulang seluruh konstruksi masyarakat.¹⁷

Gerakan perempuan juga dikategorikan sebagai salah satu bentuk gerakan sosial. Gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang ditandai oleh sebuah kritik dan transformasi citra perempuan dalam masyarakat dan oleh lahirnya nilai-nilai etis baru. Gerakan perempuan terhindar dari pengaruh dominasi negara yang bisa dilihat dari berbagai indikator yang muncul dalam berbagai interaksi dan hubungan yang dijalin para aktor gerakan perempuan. Aliansi antar elemen gerakan sosial sangat terkait dengan posisi dan perspektif perempuan sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang merubah tata kehidupan yang memberikan ruang untuk perempuan dan laki-laki.

¹⁵ Mario Diani, "The Concept of Social Movement," *The Sociological Review*, hlm. 9.

¹⁶ Peter Burke, "History and Social Theory", *Polity Press*, hlm. 92.

¹⁷ Emon Davis, *Women History Multiple Stories*, (Nijmegen: SUN, 1990), hlm. 99.

Ada berbagai macam jenis gerakan sosial,¹⁸ dan suatu gerakan sosial dapat diklasifikasikan sebagai jenis gerakan yang berbeda namun jenis-jenis gerakan sosial yang ada dapat tumpang tindih. Sebuah gerakan tertentu mengandung elemen-elemen lebih dari satu jenis gerakan.

Konsep lain yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai wilayah privat dan wilayah publik yang dianggap oleh penulis cukup relevan dengan permasalahan yang diangkatnya. Dalam konsep ini, terdapat pemisahan peran dan wilayah peran antara laki-laki dan perempuan secara kaku menjadi privat/domestik dan publik.¹⁹

Wilayah privat/ domestik adalah lingkup yang diidentikkan dengan perempuan dengan segala peran reproduksi dan pengasuhan anak yang diletakkan pada dirinya. Sedangkan wilayah publik adalah lingkup yang diidentikkan dengan laki-laki, segala hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan reproduksi dan pengasuhan anak akan berada di dalamnya, seperti misalnya pencapaian prestasi atau struktur politik, sosial dan ekonomi yang hirarkis.²⁰

Tidak hanya terdapat pemisahan peran dan wilayah peran, tetapi juga hubungan yang hirarkis antara laki-laki dan perempuan dimana dalam hubungan tersebut, posisi perempuan sub-ordinat terhadap laki-laki.²¹ Selain itu, aktivitas dan peran yang dilekatkan pada perempuan seperti menjaga atau mengurus anak memiliki nilai yang lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai segala aktivitas dan peran yang dilekatkan kepada laki-laki.²² Tentu saja semua ini melahirkan suatu konsekuensi tersendiri bagi perempuan. Keberadaan mereka yang diposisikan sedemikian rupa menyebabkan ketidak-adilan menjadi hal yang seringkali harus mereka hadapi. Wilayah publik yang diperuntukkan dan didominasi oleh kaum laki-laki, menjadi tidak sensitif terhadap kepentingan perempuan, sehingga negara yang dikategorikan berada di wilayah ini menjadi tidak aspiratif terhadap kepentingan perempuan.

¹⁸ "Social Movements Types," diperoleh dari <http://www.sociologyguide.com/social-change/social-movements-type.php>, Internet, diakses 11 November 2011.

¹⁹ Jenny Chapman, "The Feminist Perspective: Radical Feminism and The Original Political Agenda of Modern Feminism," dalam David Marsh dan Gerry Stoker (eds.), *Theory and Methods in Political Science* (New York: St. Martins Press, 1995), hlm. 98.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 96.

²² *Ibid.*

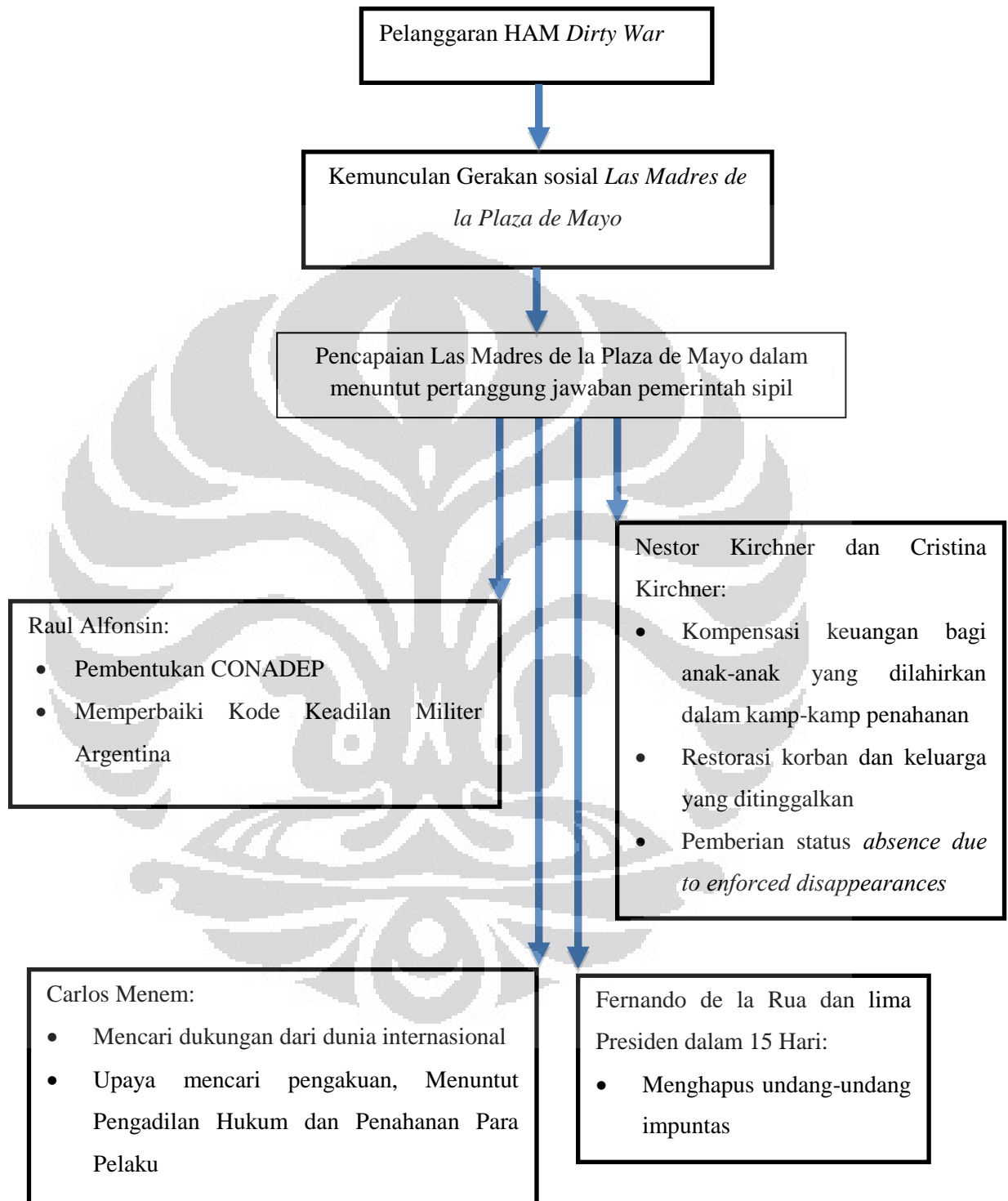
Menurut Pareto, yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (*elite*) dan lapisan bawah (*non-elite*). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). Sementara Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer dan menggunakan kekerasan.²³

Mosca meneliti komposisi elit lebih dekat lagi dengan mengenali peran 'kekuatan sosial' tertentu. Mosca mengenalkan konsep 'sub elit' yang merupakan kelas menengah dari para pegawai negeri sipil, para manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Kelas menengah ini dianggapnya sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurutnya, stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini. Sedangkan menurut Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan porsi kekuasaan sehingga terjadilah sirkulasi elit. Setiap elit yang memerintah hanya dapat bertahan apabila secara kontinuitas memperoleh dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi sirkulasi elit akan tetap berjalan karena secara individual baik elit keturunan maupun elit yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu dan sebab-sebab biologis.²⁴

²³ S.P. Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 206-207.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 204

1.5 Alur Berpikir



Pada periode *Dirty War*, pelanggaran HAM terjadi dengan sangat masif melalui teror politik yang berkepanjangan. Situasi ini memicu kemunculan *Las Madres de la Plaza de Mayo*, sebuah gerakan sosial yang dibentuk oleh warga negara Argentina sendiri untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah sipil terkait peristiwa *Dirty War*.

1.6 Asumsi

Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap pertanggungjawaban pemerintah sipil pasca pelanggaran HAM yang terjadi pada periode *Dirty War* di Argentina.

Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana perjuangan gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* terhadap pertanggungjawaban pemerintah sipil pasca pelanggaran HAM yang terjadi pada periode *Dirty War* di Argentina, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan asumsi:

1. Perjuangan yang dilakukan oleh gerakan sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* dilakukan dengan aksi diam mengelilingi Plaza de Mayo
2. Pencapaian gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* dalam menuntut pertanggung jawaban pemerintah sipil nampak pada:
 - Pembentukan CONADEP dan perbaikan kode keadilan militer Argentina pada masa pemerintahan Raul Alfonsin
 - Pencarian dukungan dari dunia internasional dan upaya mencari pengakuan, tuntutan pengadilan hukum dan penahanan para pelaku pada masa pemerintahan Carlos Menem
 - Penghapusan undang-undang impunitas selama masa pemerintahan Fernando de la Rúa dan pergantian presiden dalam 15 hari
 - Kompensasi keuangan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam kamp-kamp penahanan, restorasi korban dan keluarga yang ditinggalkan dan pemberian status *absence due to enforced disappearance*
 - Laporan evaluasi yang berjudul *March of Resistance*.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dan mengkaji masalah yang dibahas, maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi dokumentasi dan kepustakaan sebagai metode pengumpulan data.

Jenis penelitian yang dilakukan deskriptif analitis, dimana langkah awalnya mengacu pada pembongkaran isi dan sifat suatu fenomena yang akan diteliti. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan menampilkan data dengan cara yang konseptual, untuk menjelaskan konten dan perbedaan-perbedaan yang dianggap berguna.²⁵

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumentasi dan kepustakaan sehingga data-data mengenai *Dirty War*, *Las Madres de la Plaza de Mayo*, serta pertanggungjawaban pemerintah Argentina pasca junta militer yang diperoleh merupakan data sekunder, dimana data diperoleh dari buku-buku, artikel majalah dan koran, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Banyak kendala yang ditemukan penulis dalam penulisan skripsi. Walaupun data-data untuk mendukung penulisan skripsi memang terbilang mudah untuk ditemukan, namun yang ilmiah masih sulit untuk dicari. Data yang diperoleh dari internet pun hanya berupa artikel-artikel kecil yang tidak dapat diolah menjadi data ilmiah. Perpustakaan yang menjadi sasaran utama penulis dalam mengumpulkan data ternyata kurang mendukung dalam pencarian data, karena ketidaklengkapannya. Selain itu, banyak artikel dan buku yang belum ada terjemahan dalam bahasa Inggris ataupun Indonesia dan masih menggunakan bahasa Spanyol. Hal ini tentu saja merupakan kendala besar bagi penulis yang hanya menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan beberapa hal inti yang menyangkut skripsi ini secara keseluruhan, yaitu latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, kerangka

²⁵ Jane Ritchie and Jane Lewis, *Qualitative Research Practice* (London: Sage Publication, 2003), hlm. 237.

alur berpikir dan asumsi sementara, yang merupakan pengantar dalam pembahasan skripsi ini selanjutnya.

Bab 2 Konteks Sosial Historis *Las Madres de la Plaza de Mayo* pada Masa Junta Militer. Pada bab ini akan dibahas mengenai pemicu terbentuknya gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* itu sendiri, berikut sejarah dan perjuangan awal serta koalisi gerakan tersebut dengan gerakan-gerakan lain yang serupa.

Bab 3 Pencapaian *Las Madres de la Plaza de Mayo* dalam Menuntut Pertanggung Jawaban Pemerintah Sipil. Pada bab ini, akan dibahas mengenai analisis gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan pada bab pertama. Bab ini juga menjabarkan perjuangan dari gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* selama dua puluh empat tahun terakhir dan hasil yang diperoleh dari perjuangan-perjuangan tersebut.

Bab 4 Kesimpulan. Pada bab ini akan ditarik suatu kesimpulan dari seluruh pembahasan, terutama yang menyangkut permasalahan yang diangkat beserta pembuktian dari asumsi-asumsi yang diajukan.

BAB 2

KONTEKS SOSIAL HISTORIS MUNCULNYA *LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO*

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai pemicu terbentuknya gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* itu sendiri, berikut sejarah dan perjuangan awal serta koalisi gerakan tersebut dengan gerakan-gerakan lain yang serupa.

2.1 *Dirty War* sebagai Penyebab Terbentuknya Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*

Pada masa pemerintahan Juan Peron tahun 1973, partisipasi perempuan di Argentina dalam perwakilan politik mencapai tingkatan baru dari sebelumnya. Namun euforia tersebut tidak berlangsung lama. Setelah Juan Peron wafat pada tahun berikutnya, Isabel Peron menggantikan posisi almarhum suaminya. Dia mengadopsi tindakan anti feminis dengan melarang penggunaan alat kontrasepsi dan melakukan suatu reformasi hak-hak pengasuhan. Kekuasaan Isabel Peron juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1976 junta militer merebut kekuasaannya.²⁶ Masyarakat berharap kudeta yang dilakukan pada saat itu dapat mengubah nasib mereka namun yang keadaan justru bertambah buruk. Ketika junta militer melakukan kebijakan ekonomi neoliberal dan memaksakan suatu ketertiban sosial yang represif, hasilnya adalah sebuah kebijakan terorisme negara.

Situasi ini yang membuat Argentina mempunyai sejarah kelam pada abad ke-20, yang dikenal dengan periode *Dirty War* dimana junta militer melakukan pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Argentina. Sejak saat itu, puluhan ribu warga negara Argentina yang tidak bersalah dituduh komunis dan dipersekusi, ditangkap, disiksa serta ‘dihilangkan’. Dengan demikian, segenap sektor di dalam masyarakat yang dianggap mencurigakan bagi pemerintah, dihilangkan secara paksa. Korban penghilangan paksa tersebut antara lain anggota serikat buruh,

²⁶ “Argentina’s Modern History and Politics,” diperoleh dari <http://www.whatargentina.com/modern-history-politics.html>, Internet, diakses 3 Februari 2011.

kaum muda di serikat-serikat pelajar maupun mahasiswa, para wartawan, para psikolog dan sosiolog, kaum pasifis, para rohaniwan (suster atau biarawan). Bahkan teman atau kenalan dari orang-orang tersebut ikut menjadi korban. Seringkali penculikan terjadi berdasarkan ucapan-ucapan yang terlontarkan dari para korban penculikan di bawah siksaan yang sangat kejam. Mayoritas korban-korban ini sama sekali tidak tersangkut dengan tindak terorisme seperti yang dituduhkan. Sangat jarang ditemukan gerilyawan yang tertangkap hidup-hidup dan sempat menjalani rangkaian proses penyiksaan oleh rezim dengan aparatus kekerasannya. Korban-korban penculikan ini kemudian dibawa ke dalam sebuah ruangan yang dinamakan SDC (*Secret Detention Centers*), sebuah pusat penahanan rahasia,²⁷ namun para korban menyebutnya dengan ‘neraka’. Demikianlah atas nama keamanan nasional, ribuan bahkan puluhan ribu manusia dijerumuskan ke dalam kategori menjijikan “*desaparecidos*”.²⁸

Kebijakan penghilangan paksa terhadap para korban tidak mungkin terlaksana begitu saja tanpa penyediaan fasilitas berupa pusat-pusat penahanan. Terdapat sekitar 340 pusat-pusat penahanan di Argentina pada masa itu. Ribuan pria dan wanita telah dirampas kemerdekaannya secara ilegal. Penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan ini bisa berlangsung bertahun-tahun, bahkan dalam banyak kasus para korban tidak pernah dipulangkan. inilah kenyataan pahit dimana korban dipaksa menjalani hidup sebagai “orang hilang”. Ditambah lagi dengan sikap penguasa yang lepas tangan dengan menyangkal permintaan informasi apapun yang berkenaan dengan orang hilang tersebut, walaupun melalui pemeriksaan *habeas corpus*²⁹ di pengadilan. Disanalah para korban dipaksa bertahan hidup, menjalani hari-hari dengan belas kasihan dari sesama tahanan lain, di bawah keputusan akibat praktik-praktik penyiksaan dan eksterminasi³⁰ kekuasaan penuh pemegang otoritas SDC.

Sementara di sisi lain, otoritas militer yang sering melakukan kunjungan ke SDC, akan senantiasa bereaksi dingin terhadap keamanan nasional dan opini

²⁷ “Argentina Pasca Junta Militer (1976-1983),” *Laporan Final CONADEP* (Jakarta: PEC, 2007), hlm. 25.

²⁸ Sebuah kata yang seringkali dikutip tanpa diterjemahkan dari bahasa aslinya oleh media internasional karena merupakan sebuah keistimewaan yang membuat pedih warga Argentina.

²⁹ Semacam lembaga pra-preadilan yang memberi kesempatan seorang tersangka terlebih dulu untuk diperiksa mengenai keabsahan penahannya.

³⁰ Dari kata *extermination* atau praktik pemusnahan ‘unsur-unsur subversif’ ala junta militer.

dunia internasional. Karena memang pihak penguasa maupun aparat keamanan secara sistematis menolak memberikan informasi apapun perihal nasib orang-orang yang telah diculik baik atas pengaduan hukum maupun tuduhan yang dilancarkan organisasi-organisasi hak asasi tingkat nasional dan internasional. Otoritas militer di negara ini dengan mudah berkilah lewat versi sepihak angkatan bersenjata tersebut, bahwa orang-orang yang hilang sebenarnya telah melarikan diri ke luar negeri. Atau versi lainnya, bahwa kumpulan orang hilang ini telah menjadi korban pertikaian yang berlangsung di antara mereka sendiri. Ironisnya, pernyataan-pernyataan seperti ini secara resmi dicantumkan dalam jawaban yang diberikan pemerintahan *de facto* Argentina kepada Komisi HAM OAS.³¹

Karakteristik SDC maupun kehidupan sehari-hari yang harus dijalani para korban penghilangan disana, mengungkapkan bahwa SDC ini memang dipersiapkan secara khusus sebagai fungsi penaklukan atas para korban. SDC dengan sengaja dimaksudkan untuk mengambil dan mengenyahkan segala harkat dan martabat kemanusiaan dari para korban dan bukan sekedar lokasi pemusnahan manusia secara fisik.

Terperangkap dalam pusat penahanan ini mengakibatkan siapapun yang menjadi korban tidak lagi diakui eksistensinya sebagai manusia. Dalam rangka mencapai tujuan dari rezim ini, berbagai upaya telah dilancarkan agar para korban menyangkal identitas dirinya sebagai manusia. Bahkan sesungguhnya segala ingatan, acuan maupun kesadaran korban akan ruang dan waktu hendak dikikis dan dipunahkan. Tubuh dan pikiran para korban memang disiksa diluar batas kewajaran.

Keberadaan SDC tetap menjadi rahasia sampai pada satu titik dimana masyarakat, kerabat ataupun individu yang dekat dengan korban ikut peduli dan membongkar kedoknya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan SDC dan operasi penghilangan paksa yang dilakukan hanya dimungkinkan dengan alokasi anggaran keuangan maupun sumber daya manusia yang telah dipersiapkan. Dari puncak otoritas militer yang paling tinggi sampai dengan segenap jajaran dan masing-masing anggota keamananlah yang sejatinya membentuk struktur

³¹ "Report on the Situation of Human Rights in Argentina," diperoleh dari <http://www.cidh.org/countryrep/Argentina80eng/chap.3.htm>, Internet, diakses 14 Mei 2011.

penindasan ini. Dengan demikian, SDC adalah basis operasi yang paling utama, sehingga sama sekali bukan merupakan kesalahan prosedur ataupun sekedar kasus-kasus yang berdiri sendiri.

Kenyataan seperti ini terus-menerus disangkal dan dibantah oleh pihak penguasa di Argentina. Sementara pemerintahan militer yang berkuasa juga memanfaatkan kendali total yang dimiliki untuk membungkam media, menghilangkan kesadaran dan menyesatkan rakyatnya sendiri. Dari jajarannya yang paling tinggi, pemerintahan militer berusaha untuk menghadirkan citra Argentina sebagai negara hukum yang tegas di hadapan masyarakat internasional. Dengan tidak mengindahkan batasan apapun juga, perundang-undangan de facto bahkan melarang pemerintahan diktator militer ini dalam melanggengkan struktur paralel represi keji yang ditutup-tutupi.

Pusat-pusat penahanan rahasia penuh dengan tahanan-tahanan politik yang berusaha digambarkan penguasa sebagai penjahat kriminal biasa. Cara ini dipakai untuk menyamarkan praktik-praktik pengekangan ideologis yang mencapai level tertinggi. Setelah periode panjang dalam penahanan rahasia, banyak dari korban penculikan ini dilepaskan dan menemukan kenyataan bahwa penculikan itu dibuat seolah-olah dibawah prosedur penahanan yang sah dan resmi, dan dengan melakukan pemindahan dari SDC ke penjara umum atau kantor-kantor polisi setempat. Beberapa organisasi memang terkait erat dengan terorisme negara ini. Organisasi-organisasi tersebut meliputi Batallon de Inteligencia 601 dari unit militer, Sekolah Mekanik Angkatan Laut, ESMA (*The Naval Mechanics School*), dan SIDE (*Secretaria de Inteligencia de Estado*). SIDE bekerja sama dengan DINA, mitranya dari Chili dan satuan-satuan intelijen Amerika Selatan dalam Operasi Burung Kondor.

Saat penculikan berlangsung, para korban dirampas segala bentuk hak-hak dasarnya. Para korban langsung diisolasi dari dunia luar, disekap di tempat-tempat rahasia, disiksa secara keji dan dibiarkan terkatung-katung tanpa tahu-menahu mengenai nasib yang segera menimpanya. Terkadang para korban tanpa diduga dilempar begitu saja ke sungai atau tengah laut bahkan dibakar hidup-hidup. Penculikan yang terjadi adalah operasi-operasi yang terorganisir dengan rapi, terkadang berlangsung di tempat kerja korban atau di jalan-jalan raya di siang

hari. Penculikan ini melibatkan personil-personil militer secara terang-terangan, yang juga dengan sepengetahuan pos-pos kepolisian lokal. Ketika seorang korban tengah diburu di rumahnya pada malam hari, unit-unit bersenjata akan mengepung seluruh jalan masuk dan mendobrak masuk ke dalam dengan turut menyebarkan teror pada orang tua maupun anak-anak mereka, yang kerap kali turut disekap dan dipaksa untuk menonton aksi penculikan tersebut. Lazimnya militer langsung menculik orang-orang yang diincar, memukul tanpa belas kasihan, mengikat korban ke dalam mobil atau truk pengangkut yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sementara unit lainnya memporak-porandakan seluruh isi rumah atau menjarah apapun yang dapat diambil.

Berbagai bentuk penyiksaan dilakukan oleh angkatan bersenjata terhadap korban penculikan, mulai dari pemukulan sampai dengan pelecehan seksual. Mutu makanan yang disediakan juga sangat rendah. Para tahanan diberi makan hanya satu atau dua kali dalam satu hari. Namun seringkali para tahanan tidak diberi makanan apapun selama sehari-hari. Di lain waktu para tahanan diberikan air dengan tepung atau jeroan hewan yang tidak dimasak. Para tahanan tidak boleh memberikan jatah makanannya kepada tahanan lain yang kondisinya lebih buruk dan bagi tahanan yang mencoba melanggarnya akan dijatuhi hukuman tambahan. Kesetiakawanan menjadi hal yang sangat terlarang disana dan pelanggarnya akan diberi ganjaran yang berat.

Berbagai penyakit baru bermunculan akibat pembakaran, pendarahan, peradangan dan infeksi. Banyak juga perempuan yang sedang mengandung dan terpaksa melahirkan di dalam penjara. Sebagian ada yang proses persalinannya ditolong oleh dokter yang didatangkan dari rumah sakit angkatan laut, namun ada juga beberapa yang lahir hanya dibantu dengan kekuatan alam. Bayi-bayi yang baru dilahirkan langsung dipisahkan dari ibunya dan diambil oleh rezim militer untuk diadopsi, padahal kondisi sepanjang periode penahanan ini sangatlah memprihatinkan. Para tahanan dibiarkan terbaring di kasur yang penuh oleh tumpahan darah, air seni, muntahan dan berbagai peluh. Dalam beberapa kasus, tahanan terpaksa buang air di dalam pot atau bahkan tidak diberi wadah apapun sehingga harus buang air di lantai di ruangan tahanannya sendiri. Ketiadaan perawatan di berbagai lokasi penahanan yang penghuninya melebihi kapasitas

semakin memperburuk kondisi kesehatan para tahanan. Satu-satunya kain yang ada selain digunakan sebagai kasur untuk tidur bersama-sama, digunakan juga untuk membersihkan kotoran para tahanan yang buang air.

Pengawal hanya akan mengantar para tahanan ke kamar mandi apabila izin sudah diminta dari mayoritas tahanan, sehingga penjaga tahanan tidak perlu mengantar para tahanan ke kamar mandi lebih dari dua kali dalam satu hari. Para tahanan dibawa layaknya kereta api, dimana seseorang memegang pundak atau pinggul orang yang berada di depannya untuk mencegah mereka membuka tudung kepala. Hal ini terjadi hampir di seluruh kamp dan merupakan salah satu kesempatan bagi para pengawal untuk mengambil keuntungan dalam memuaskan nafsu sadistis mereka dengan memukul para tahanan secara tidak pandang bulu. Baik pria maupun wanita diwajibkan untuk mandi dan mengurus kebutuhan fisiknya sendiri di hadapan para pengawal tahanan, bahkan para tahanan di beberapa kamp diguyur secara berkelompok dengan tudung kepala yang tetap terpasang.

Perawatan kesehatan toilet dan sel sangat tergantung pada disposisi sejauh mana para tahanan dianggap baik atau buruk menurut penjaga yang sedang bertugas. Dalam beberapa kasus, tahanan perempuan dipaksa membersihkan jamban di toilet tanpa sehelai bajupun. Keadaan perawatan kesehatan yang sedemikian ekstrim mengakibatkan timbulnya borok-borok di tubuh para tahanan namun mereka hanya disemprot obat pembasmi hama oleh penjaga tahanan.³²

Di sejumlah tempat penahanan, istilah ‘pemindahan’ erat kaitannya dengan kematian. Sebelum hari pemindahan, para tahanan diinformasikan bahwa mereka akan dipindahkan ke lokasi penahanan lain atau lokasi ‘rehabilitasi’. Para tahanan sebelumnya diberikan makanan yang lebih baik dan diberikan kesempatan untuk mandi beserta pakaian baru karena para tahanan diharuskan untuk menanggalkan pakaian maupun barang-barang di lokasi penahanan sebelumnya untuk dibakar sampai menjadi abu. Setelah itu, pengawal terkadang akan mencoba menenangkan mereka dengan mengiming-imingi harapan hidup atau justru memberikan suntikan agar para tahanan terlelap untuk kemudian dibawa ke lokasi eksekusi mati. Hukuman mati dilakukan secara kejam oleh rezim

³² Laporan Final CONADEP (2007), *Op.Cit.*, hlm. 171.

militer ini. Selain dibenamkan di dalam air, eksekusi terkadang dilakukan melalui pembekapan atau pencekikan, ditembak atau dibakar hidup-hidup. Eksekusi bisa dilakukan secara massal maupun individual.

Proses penculikan, penyiksaan sampai pembunuhan ini juga berlaku bagi orang cacat, anak-anak, remaja, lansia dan dari berbagai kalangan seperti anggota serikat buruh, pengacara, wartawan, anggota-anggota biara dan sebagainya. Proses pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu dan tidak ada satupun yang diputuskan dari peradilan umum dengan alasan mencegah tindakan-tindakan kejahatan yang subversif. Peristiwa ini merupakan sejarah kelam yang masih menimbulkan implikasi serius sebagai salah satu bentuk kejahatan atas kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia. Strategi ketegangan yang melibatkan teror dan tekanan nyata dikembangkan sebagai bagian dari langkah pembenaran dari suatu program rezim otoriter yang menindas.

Adanya fakta bahwa militer merencanakan suatu restrukturisasi sosial dalam jangka panjang mendorong mobilisasi perempuan yang secara langsung memprovokasi formasi kelompok baru yaitu *Las Madres de la Plaza de Mayo*, sebuah gerakan yang berbasis prinsip etika dan non-kekerasan. Ibu-ibu *Las Madres de la Plaza de Mayo* dengan berani membela dan menuntut keadilan atas keluarga dan bayinya yang dicuri dan bagi suami, anak dan sanak keluarganya yang dibunuh atau 'dihilangkan' oleh rezim junta militer. Tindakan sederhana seperti aksi diam mengelilingi piramida di depan Plaza de Mayo membuat mereka menjadi ikon pergerakan politik melawan rezim militer. Gerakan perempuan ini awalnya merupakan organisasi nenek-nenek dan ibu-ibu yang pada perkembangannya menjadi organisasi para aktivis Hak Asasi Manusia.

2.2 Sejarah *Las Madres de la Plaza de Mayo*

Rezim militer di Argentina di bawah pemerintahan Jorge Rafael Videla sejak tanggal 24 Maret 1976 tidak datang secara tiba-tiba. Setelah masa krisis ekonomi dan politik, banyak kelas menengah Argentina yang menyatakan harapan bahwa pemerintahan militer akan membawa keadaan Argentina stabil dan normal, ternyata pada praktiknya tidak sesuai dengan harapan masyarakat Argentina pada masa itu. Dimana-mana terjadi penculikan yang ditujukan bagi masyarakat yang

berani melakukan perlawanan terhadap rezim militer yang berkuasa. Hal ini berlaku untuk semua kalangan seperti serikat buruh, aktivis politik, mahasiswa, kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia dan lain sebagainya. Periode ini dikenal dengan istilah *Dirty War* yang lazimnya mengacu pada program terorisme negara untuk merespon segala bentuk subversi sayap kiri yang mengancam bentuk stabilitas negara. Strategi ketegangan yang melibatkan terror dan tekanan, nyata dikembangkan sebagai bagian dari langkah pembenaran suatu program rezim otoriter untuk menindas.

Selama setahun kedepan, rezim merasa semakin berkuasa dan membawa Argentina ke masa-masa suram. Ditengah-tengah kekuasaan rezim ini, berdirilah sebuah organisasi yang digerakkan oleh ibu-ibu Argentina dan dinamakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* yang berdiri pada tanggal 30 Maret 1977.³³ Gerakan ini dimotori oleh ibu-ibu korban penghilangan secara paksa yang terjadi pada periode *Dirty War*. Gerakan ibu-ibu tersebut menjadi ikon pergerakan dan perjuangan masyarakat sipil di Argentina selama 32 tahun.³⁴ Awalnya tidak ada ide secara terstruktur untuk membentuk sebuah gerakan sosial. Gerakan ini hanya sebagai usaha untuk mencari tahu letak anak dan suami mereka yang dihilangkan secara paksa oleh rezim.

Maria Adela Antokoletz mencari anaknya disalah satu kantor polisi setempat di Argentina, namun pihak kepolisian tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Seperti halnya Maria, ibu-ibu lain yang membawa keluhan yang sama juga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Selama menunggu di dalam hiruk pikuknya kantor kepolisian, Maria bertemu dengan salah satu perempuan paruh baya yang sedang melaporkan anaknya yang juga hilang. Ternyata nasib yang dialaminya sama dengan Maria, tidak ada jawaban pasti dari pihak kepolisian. Akhirnya, mereka memunculkan sebuah ide untuk mendatangi Plaza de Mayo dalam rangka bertemu Jenderal Jorge Rafael Videla untuk membicarakan masalah tersebut. Ide ini kemudian berkembang dan terjadi kesepakatan diantara mereka untuk bertemu dan mengumpulkan ibu-ibu yang

³³ Adam Bennet, Marcee Ludlow, and Christopher Reed, "Madres de Plaza de Mayo," diperoleh dari <https://webspaces.utexas.edu/cm485/www/mothers/history.html>, Internet, diakses 2 April 2011.

³⁴ *Ibid.*

sanak keluarganya menjadi korban penghilangan secara paksa di Plaza de Mayo pada tanggal 30 April 1977 pada pukul 11.00.³⁵

Plaza de Mayo merupakan pusat kota dari Buenos Aires. Di tengah-tengah terdapat sebuah piramida yang berdiri tegak untuk memperingati pergerakan kemerdekaan bangsa Argentina pada tanggal 25 Mei 1810.³⁶ Terdapat bangunan berbentuk segi empat yang disebut sebagai Istana *Casa Rosada*. Di sekitarnya terdapat bangunan-bangunan peninggalan kolonial, Bank Nasional dan berbagai kantor pemerintahan. Biasanya tempat ini ramai dikunjungi oleh turis-turis lokal dan mancanegara. Selain karena letaknya yang berdekatan dengan daerah bisnis, tempat ini juga sering digunakan untuk duduk bersantai sambil memberi makan burung dara atau sekedar menikmati bunga-bunga di taman.³⁷

Pertemuan pada tanggal 30 April 1977 dihadiri oleh 14 ibu-ibu yang sanak keluarganya menjadi korban penghilangan secara paksa.³⁸ Tanggal tersebut jatuh pada hari Sabtu dan setiap akhir minggu keadaan di Plaza de Mayo sangat sepi, maka direncanakan kembali pertemuan di minggu berikutnya. Jumat 13 Mei 1977, ibu-ibu yang datang makin bertambah jumlahnya. Salah satu ibu mengatakan bahwa hari Jumat merupakan hari yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, aksi ibu-ibu ini kemudian diadakan secara rutin setiap hari Kamis pukul 15.30 dengan simbol dan atribut yang sederhana, yaitu berupa kerudung kepala warna putih dengan bordiran nama-nama keluarga mereka yang hilang sambil membawa papan yang ditempel foto-foto anggota keluarga yang hilang. Pada mulanya ibu-ibu ini hanya duduk dan berkumpul bersama untuk diskusi dan bertukar pikiran, kemudian datanglah seorang polisi yang mengatakan bahwa tidak boleh ada dua orang atau lebih berkeliaran di sekitar Plaza de Mayo dan ibu-ibu ini terpaksa pindah. Oleh karena itu, mereka mengubah metode dengan berjalan tanpa berbicara dan selama setengah jam mengelilingi piramida yang terletak di tengah alun-alun di depan Istana Casa Rosada. Dari sinilah aksi Plaza de Mayo terus dilakukan dan telah berjalan selama 32 tahun.³⁹

³⁵ Susan E. Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements* (California: University of California Press, 1989), hlm. 250.

³⁶ Robert J. Alexander, *An Introduction to Argentina* (London: Pall Mall Press, 1969), hlm. 53.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Eckstein, *Op.Cit.*

³⁹ *Ibid.*

2.3 Perjuangan Awal Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*

Las Madres de la Plaza de Mayo yang didirikan oleh empat belas ibu-ibu Argentina pada tahun 1977 merupakan suatu bentuk kesadaran kolektif dari warga negara Argentina untuk menekan pemerintah, mewujudkan kebenaran demi terciptanya keadilan yang ditegakkan sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku secara universal. Tahun 1977 merupakan awal dari aksi damai inovatif yang dilakukan oleh *Las Madres* dengan berjalan berpasang-pasangan mengelilingi alun-alun Plaza de Mayo. Plaza de Mayo terletak tepat di depan Istana Casa Rosada dan Katedral Kota yang merupakan pusat kekuasaan junta militer, di tengah-tengah kota Buenos Aires.⁴⁰ Metode perjuangan gerakan *Las Madres* awalnya dianggap sepele, namun ternyata mampu menjatuhkan junta militer yang saat itu berkuasa. Dianggap sepele karena anggota *Las Madres* hanyalah ibu-ibu rumah tangga sederhana dalam suatu masyarakat patriarkis dan hampir tidak memiliki latar belakang kemampuan politik yang memadai.

Lengkap dengan berbagai simbol dan atribut yang sederhana, kerudung kepala putih dengan bordiran nama-nama keluarga yang hilang, mereka selalu menampakkan diri di Plaza de Mayo setiap hari Kamis sore selama kurang lebih setengah jam. Lewat gerakan simbolik tersebut, jeritan hati pengalaman subyektif *Las Madres* bertransformasi menjadi suara perlawanan yang meskipun tidak terdengar, selalu mengusik eksistensi penguasa tiran di Argentina. Aksi diam mengelilingi piramida kurang mendapat respon yang memuaskan dari pemerintahan junta militer, bahkan *Las Madres* dianggap sebagai kumpulan ibu-ibu gila. Menanggapi respon tersebut, dalam perjuangannya *Las Madres* mencari dukungan dari luar negeri agar gerakan ini semakin kuat dalam menjalankan aksinya.

Pada tanggal 7 Agustus 1977, Patricia Derian dari departemen koordinator Hak Asasi Manusia Amerika Serikat berkunjung ke Argentina. *Las Madres* kemudian mengajukan permohonan untuk mewawancarai Patricia Derian. Beberapa hari kemudian, Terrence Todman yang merupakan asisten sekretaris urusan luar negeri Amerika Serikat datang ke Argentina untuk bertemu Jenderal Videla di Casa Rosada. Kedatangan Terrence Todman tersebut memicu gerakan

⁴⁰ Subono, *Op.Cit.*

Las Madres untuk melakukan aksi. Akibatnya, 100 orang anggota *Las Madres de la Plaza de Mayo* ditahan namun tidak membuat gerakan ini menyerah begitu saja.⁴¹

Las Madres mulai membentuk suatu kerjasama dengan gerakan lain, seperti *The Movement of Relatives of the Dissapeared*, sebuah gerakan yang anggotanya perempuan dan laki-laki yang mencari sanak keluarganya yang hilang pada periode *Dirty War*. Pada Oktober 1977, 300 orang yang sebagian besarnya perempuan berkumpul di depan gedung Kongres untuk membacakan dokumen yang ditujukan pada pemerintahan junta militer dan telah ditandatangani oleh 24.000 orang. Isi dari dokumen tersebut adalah permohonan untuk menginvestigasi kasus penghilangan dan permohonan untuk melepaskan para tahanan yang sebenarnya tidak bersalah. Namun aksi tersebut berhasil digagalkan oleh polisi dengan menggunakan gas air mata dan 150 orang yang diduga terlibat ditangkap.⁴²

Pada tanggal 8 Desember 1977, *Las Madres* dan *The Movement of Relatives of the Dissapeared* merencanakan penulisan surat untuk dipublikasikan pada hari Hak Asasi Manusia sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember. Sayangnya, aksi ini kembali digagalkan oleh junta militer. Surat yang telah ditulis dan uang yang telah berhasil dikumpulkan untuk biaya publikasi ke media internasional dicuri oleh pihak militer. Namun segala usaha yang diperbuat oleh pemerintah untuk membungkam aksi *Las Madres* justru membuat gerakan ini semakin berani. Mereka melakukan *press conference* dengan hanya mengundang koresponden dari luar negeri dan *Buenos Aires Herald*, dimana *Buenos Aires Herald* ditulis dalam bahasa Inggris dan editornya adalah Robert J. Cox. Dalam *press conference* tersebut, *Las Madres* mengungkapkan kejadian yang telah menimpa para kerabatnya.⁴³

Las Madres bergabung dengan organisasi-organisasi Hak Asasi Manusia di Eropa dan Amerika Serikat, sebagai upaya untuk membuka mata dunia akan

⁴¹ Abejah Dispatch, "The Mothers of The Plaza de Mayo: 24 Years of Rocking Argentina," diperoleh dari <http://www.worldtrek.org/odyssey/latinamerica/060999/060999abejamadres.html>, Internet, diakses 23 Maret 2011.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Eckstein, *Op.Cit.*, hlm. 251.

keadaan Argentina pada masa itu.⁴⁴ Dengan mendapat bantuan dari gerakan perempuan di Belanda, pada tahun 1978 *International Amnesty* mengadakan pertemuan antara *Las Madres* dengan sekelompok perempuan Belanda termasuk wartawan, penulis, guru dan anggota parlemen.⁴⁵ Hasil dari pertemuan ini adalah terbentuknya sebuah organisasi yang mendukung gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*, organisasi ini bernama SAAM (*Support Group for the Mothers of the Plaza de Mayo*). Organisasi ini memulai kampanye dengan menyampaikan segala sesuatu yang menimpa Argentina kepada dunia dengan tujuan penggalangan dana dalam menjalankan aktivitas *Las Madres de la Plaza de Mayo*.⁴⁶ Bahkan mereka tidak menyalakan kesempatan untuk mendapat perhatian dunia internasional pada saat Argentina menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1978, dimana banyak wartawan media dari berbagai negara berdatangan. Ketika Argentina sedang merayakan kemenangan Piala Dunia, *Las Madres* melakukan aksinya dengan mengelilingi piramida di depan Plaza de Mayo. Berbagai media internasional menyoroti aksi mereka, salah satunya adalah Dutch TV. Dutch TV menayangkan berita kemenangan Argentina, namun di tengah-tengah kegembiraan yang tersorot nampak para anggota *Las Madres* yang menampakkan muka sedih karena kehilangan sanak saudaranya. Bahkan Dutch TV juga menayangkan salah satu anggota *Las Madres* yang mengatakan “*We are the Mothers of Dissapeared from Buenos Aires Argentina and we are coming to discuss human rights*”.⁴⁷ Dunia internasional akhirnya mengetahui apa yang terjadi di Argentina melalui tayangan-tayangan tersebut. Akibatnya, *Las Madres* mulai mendapat dukungan dari organisasi-organisasi HAM lainnya sehingga pada tahun 1979 *Inter-American Commission on Human Rights* berkunjung ke Argentina dan berhasil menahan beberapa dokumen ilegal kasus penculikan dan penindasan yang dilakukan semasa kekuasaan junta militer.⁴⁸

Setiap harinya *Las Madres* memasang iklan di koran yang bertuliskan “*When you buy flowers, think a minute about those mothers in Argentina, looking*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 252.

⁴⁵ Haley Cutler, “Digging Up the Dirt: Who Really Won Argentina’s Dirty War?”, diperoleh dari <http://www.gwu.edu/~uwp/fyw/euonymous/2004-2005/Cutler.pdf>, Internet, diakses 2 Mei 2011.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Eckstein, *Op.Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

for their children since the military coup of 1976". Selain SAAM, *Las Madres* juga mendapat dukungan dari berbagai kelompok seperti *Christian Democrat*, *Social Democrat*, dan partai-partai kiri lainnya. Kelompok-kelompok yang aktif di Belanda ini juga bertanggung jawab atas semua bantuan ekonomi yang diterima oleh *Las Madres* dari luar. Mereka bahkan menyelenggarakan konferensi di universitas yang berada di pusat kota Argentina. Sebagai hasil dari segala usaha yang telah ditempuh oleh *Las Madres*, *Dutch Trade Union Organization* bersedia memberikan bantuan keuangan kepada gerakan tersebut.⁴⁹

Las Madres de la Plaza de Mayo juga membangun hubungan kerjasama dengan organisasi Hak Asasi Manusia internasional seperti *Human Rights Watch*, *C.I.C.R.*, *World Council of Churches*, *Mitterand Foundation*, *The Human Rights Coordinator of Paris and Grenoble, France*, serta kerja sama dengan FEDEFAM (*Latin American Federation of Associations for Relatives of the Detained-Dissapeared*).⁵⁰ Hal ini dilakukan oleh *Las Madres* guna mempermudah perjuangan melawan junta militer. Sebelum *Las Madres de la Plaza de Mayo* muncul, banyak gerakan sosial yang dihentikan kegiatannya. Namun setelah gerakan ini muncul ke ruang publik dengan keberaniannya melawan junta militer, muncul kembali gerakan-gerakan lama yang kegiatannya sempat dihentikan karena larangan pemerintah. Oleh karena itu, gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* seringkali disebut sebagai ikon pergerakan masyarakat sipil Argentina.

Semua yang telah diperjuangkan oleh *Las Madres* pada akhirnya membuahkan hasil. Hal ini nampak pada tahun 1980, ketika Amerika Serikat menghentikan bantuan militer dan pinjaman dana ke Argentina karena kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim militer.⁵¹ Penghentian bantuan militer dan pinjaman dana ini akan terus diberlakukan oleh Amerika Serikat apabila junta militer tidak segera menghentikan kejahatan HAM yang mereka lakukan pada rakyat Argentina. Inilah penyebab utama dari krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan junta militer. Kekalahan pihak militer Argentina

⁴⁹ Miryam Criado, "Mother Images in Latin American Literature," Diperoleh dari <http://www.hope.edu/latinamerican/motherimages.html>, Internet, diakses 11 Februari 2011.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Eckstein, *Op.Cit.*

pada perang Malvinas, krisis ekonomi dan gerakan-gerakan sosial yang semakin menyudutkan junta militer membuat pemerintahan ini jatuh pada tahun 1983.

Adapun organisasi turunan dari *Las Madres de la Plaza de Mayo* adalah *Asociacion Civil Abuelas de Plaza de Mayo* yang bertujuan untuk mencari bayi-bayi dan anak-anak yang diculik oleh militer pada masa *Dirty War*. Selain anak-anak, ibu-ibu yang sedang hamil pun turut menjadi korban penyiksaan junta militer. Setelah ibu-ibu hamil ini melahirkan anaknya di dalam penjara, mereka dibunuh dan bayinya diambil oleh pihak militer. bayi-bayi tersebut diambil untuk diadopsi oleh para pejabat tinggi militer.⁵²

Organisasi ini berdiri pada tahun 1977 dan didedikasikan untuk berjuang mencari anak-anak dan cucu-cucu mereka yang hilang tanpa putus asa.⁵³ Organisasi ini terus menuntut tanggung jawab ganti rugi dari kasus penghilangan anak-anak yang dilakukan oleh pihak junta militer sembari mencari orang tua dari anak-anak tersebut. Merasa kehilangan anak dan cucunya, ibu-ibu ini terus berupaya mengunjungi setiap pengadilan, kantor, panti asuhan, tempat penitipan anak pada siang hari dan tempat-tempat umum lainnya. *Asociacion Civil Abuelas de Plaza de Mayo* juga berhadapan dengan pengadilan, pemerintah militer, hirarki gereja dan Mahkamah Agung secara terus menerus namun tidak ada hasil yang positif. Mereka terus berusaha untuk mengajukan klaim ini ke organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan *Organization of American State* namun tetap mengalami kegagalan.

Pada saat anak-anak ini diculik, identitas, agama serta memori tentang kehidupan bersama keluarganya dihilangkan begitu saja. Maka yang menjadi fokus dari organisasi ini adalah mengembalikan anak-anak yang diculik kepada keluarganya. Pencarian dimulai dari penyelidikan di pengadilan lokal maupun internasional, termasuk kasus adopsi dan anak-anak tanpa nama yang sudah tercatat di dalam pengadilan tersebut, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap semua kelahiran yang telah tercatat dalam kantor-kantor pemerintahan. Fokus

⁵² Sarah Radcliffe, *Women's Place/ El Lugar de Mujeres: Latin America and The Politics of Gender Identity* (London: Routledge, 1993), hlm. 102.

⁵³ "The Grandmothers of the Plaza de Mayo," diperoleh dari www.derechos.org/human-rights/grandmothers.html, Internet, diakses 2 April 2011.

organisasi ini pada akhirnya dikembangkan dengan memulai kampanye untuk menarik kaum muda yang merasa ragu akan identitas mereka sendiri.⁵⁴

Asociacion Civil Abuelas de Plaza de Mayo menerbitkan pengumuman di koran-koran lokal, menyebarkan poster dan selebaran lengkap dengan foto-foto dan rincian mengenai anak-anak yang hilang agar dibaca oleh orang-orang yang mengetahui informasi berkaitan dengan penyiksaan.⁵⁵ Usaha mereka pun membuahkan hasil karena pada tahun 1992 *The National Executive Power* membuat komite yang dinamakan CONADI (*The Committee for the Right to Identity*). Tujuan utama dari CONADI⁵⁶ adalah untuk membantu remaja-remaja yang merasa ragu akan identitas dirinya. Remaja-remaja ini dibujuk untuk mengikuti sebuah tes DNA. Tes DNA ini dilakukan oleh National Data Bank yang memiliki kekuatan untuk melakukan analisis tanpa intervensi hukum. Pengetahuan-pengetahuan modern juga digunakan untuk menunjang akurasi hasil analisis. Oleh karena itu CONADI mengandalkan dukungan dari komunitas ilmiah dalam bidang genetika, hematologi dan morfologi.⁵⁷ 87 orang ditemukan termasuk 4 orang anak yang ditemukan oleh pemerintah dan 2 orang ditemukan oleh CLAMOR, sebuah komite pertahanan hak asasi manusia di Southern Cone sejak organisasi ini berdiri selama 32 tahun. Sebagian dari anak-anak ini sudah berkumpul dengan keluarga kandungnya.⁵⁸

2.4 Koalisi *Las Madres de la Plaza de Mayo* dengan Organisasi-organisasi Lainnya

Ketika junta militer melakukan kebijakan ekonomi neoliberal dan memaksakan suatu ketertiban sosial yang represif, hasilnya adalah sebuah kebijakan terorisme negara. Proses ekonomi yang dikembangkan oleh junta militer berakibat pada pendapatan masyarakat yang menurun tajam. Berbagai layanan sosial buruh dan keluarga yang sebelumnya diterima masyarakat,

⁵⁴ Ellen Ross, *New Thoughts on the Oldest Vocation: Mothers and Motherhood in Recent Feminist Scholarship* (Winter: Signs, 1995), hlm. 397-399.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 400-401.

⁵⁶ “Abuelas de Plaza de Mayo,” diperoleh dari <http://www.globalministries.org/lac/projects/grandmothers-of-the-plaza-de-mayo.html>, Internet, diakses 29 Maret 2011.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

diberhentikan pada saat junta militer berkuasa. Begitu juga dengan layanan kesehatan gratis dan kesempatan-kesempatan pendidikan. Sebagai konsekuensinya, standar hidup sektor-sektor rakyat menurun tajam. Kaum perempuan menjadi korban paling dirugikan dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh junta militer karena secara alamiah, perempuan sudah memikul tanggung jawab akan peranan reproduktif sekaligus dalam kesejahteraan keluarga.

Respon-respon perempuan terhadap kediktatoran militer terbagi dalam dua tipe.⁵⁹ Respon pertama berusaha untuk mengatasi kelesuan yang menguasai institusi yang diciptakan sebelum kediktatoran, sedangkan respon kedua menciptakan organisasi baru dengan basis dukungan massa yang baru. Kelompok-kelompok perempuan ini tidak mencoba untuk membuat persetujuan dengan partai politik, sebagaimana halnya yang didiktekan oleh praktek konvensional, namun meminta suatu konsensus sosial yang baru mengenai tema-tema yang menyatukan perempuan dari berbagai sektor politik yang berbeda dan kelas sosial yang berbeda.

Tindakan represif yang dilakukan oleh junta militer menambah jumlah orang dalam oposisi politik. Oposisi ini adalah gabungan dari tiga organisasi perempuan yang membangkitkan sebuah masyarakat yang dibisukan dalam bayang-bayang kejahatan militer. Dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mau menerima segala resiko, bertanggung jawab dan berjuang dalam menegakkan prinsip kehidupan melawan suatu pemerintahan yang memporak-porandakan nilai kehidupan manusia.

Perempuan-perempuan ini tergabung dalam tiga jenis kelompok,⁶⁰ yaitu perempuan yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia yang lebih dikenal dengan nama *Las Madres de la Plaza de Mayo*, kedua adalah gerakan perempuan yang sedang berjuang untuk menjamin sumber daya minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup keluarga, sedangkan yang ketiga adalah kelompok yang berjuang demi kepentingan perempuan dari suatu perspektif feminis. Ketiga kelompok ini berpartisipasi dalam oposisi terhadap kediktatoran, menciptakan dan

⁵⁹ Jaquette (1991), *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁶⁰ *Ibid.*

membentuk transisi demokrasi setelah kekalahan Argentina dalam Perang Malvinas.

Las Madres de la Plaza de Mayo merupakan sebuah gerakan perempuan yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia. Kelompok ini menolak dikategorikan sebagai gerakan feminisme. Kemampuan *Las Madres* untuk menyatukan dan berjuang untuk perdamaian menjadi senjata aktif dalam perjuangannya dan menjadikannya sebuah kebangkitan yang signifikan dari sisi politik konvensional. Tugas yang diemban untuk mempertahankan kehidupan itu berasal dari wilayah pribadi rumah tangga dan masuk ke dalam ruang otonom dari ekspresi publik dan politik.

Gerakan ini semakin kuat dan menjadi gerakan yang dipandang oleh masyarakat baik dari dalam maupun dari luar, berdampak pada organisasi-organisasi perempuan seperti *Housewife Organization* dan gerakan feminisme yang ikut berkoalisi dengan *Las Madres*. Kelompok-kelompok ini sadar bahwa apa yang diperjuangkan oleh *Las Madres* menganut nilai-nilai yang juga diperjuangkan oleh kelompoknya.

2.4.1 *Housewife's Organization*

Antara bulan Oktober dan Desember 1982, sebuah protes kuat yang mengejutkan tersebar di Buenos Aires yang dipicu oleh melonjaknya biaya hidup. Protes ini dikenal sebagai *vecinazos*, melibatkan tingkat partisipasi feminin yang tinggi, dimana komite para istri bergabung dengan berbagai protes yang berlangsung di sekeliling kota Buenos Aires dan memimpin proses bernegosiasi dengan para pejabat pemerintahan lokal.⁶¹

Meskipun kelompok ini mulai dipandang selama *vecinazos*, namun para istri ini sebenarnya pernah melakukan aksi protes. Beberapa bulan sebelumnya, demonstrasi rukun tetangga perempuan telah memboikot sejumlah produk dan berpartisipasi dalam demonstrasi menentang kualitas hidup yang buruk di Argentina. Pada bulan Juli 1982, Gerakan Nasional Para Istri lahir di dalam suatu rukun tetangga kelas menengah di distrik San Martin, Buenos Aires. Perempuan-perempuan ini secara spontan menentang lonjakan harga melalui kampanye

⁶¹ Jaquette (1991), *Op.Cit.*, hlm. 85.

“Jangan Belanja pada hari Kamis” dan dengan cepat melahirkan sejumlah harapan yang tak pernah terjadi sebelumnya di kalangan publik.⁶² Gerakan Nasional Para Istri muncul selama masa transisi di Argentina bersamaan dengan perempuan yang bekerja di dalam organisasi rukun tetangga, namun memiliki sedikit pengalaman dengan arus politik yang luas. Gerakan Nasional Para Istri merupakan aktor politik yang baru di dalam perjuangan melawan kemiskinan yang dimulai dengan menjauhi kegiatan politik dan kegiatan tradisional perempuan.

Sama seperti *Las Madres de la Plaza de Mayo*, para istri bersikeras bahwa gerakannya tidak mengikuti suatu agenda politik dan pendekatan ideologis tertentu. Gerakan para istri ini mendukung aksi-aksi lain, seperti aksi solidaritas bersama pemenang nobel perdamaian Adolfo Perez Esquivel untuk *Las Madres de la Plaza de Mayo*.⁶³ Slogan “kebijakan kami merupakan buku saku para suami kami” yang digunakan oleh kelompok ini sangat jelas mengikuti gender.⁶⁴

2.4.2 Kaum Feminis

Sebagian besar kelompok feminis yang muncul pada awal 1970-an dibubarkan setelah kudeta militer 1976. Persatuan Feminis Argentina, Gerakan Pembebasan Feminis dan Asosiasi untuk Pembebasan Perempuan Argentina menghentikan kegiatannya pada saat itu, begitu juga dengan MLF (Front Hak-hak Perempuan) dan sebuah organisasi payung kelompok-kelompok feminis dan perempuan dari partai-partai politik yang terbentuk pada tahun 1975.⁶⁵ CESMA (*Center for the Social Study of Argentina Women* atau Pusat Studi Perempuan Argentina) yang dibentuk pada tahun 1974 oleh sekelompok perempuan anggota FIP (*Popular Leftist Front* atau Front Kiri Rakyat) memulai pertemuan di luar partai untuk mendiskusikan situasi perempuan di jajaran partai. Meskipun banyak dari anggotanya meninggalkan partai pada tahun 1976, CESMA tetap aktif. Mayoritas anggotanya percaya pada “militansi ganda” yang paralel dengan kerja

⁶² Jaquette (1991), *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁶³ Jaquette (1991), *Op.Cit.*, hlm. 85.

⁶⁴ Bennet, Ludlow, and Reed, *Op.Cit.*

⁶⁵ J.G. Schirmer, “Those Who die for Life Cannot be Called Dead’, Women and Human Rights Protest in Latin America,” *Feminist Review*, Vol. 32 (1989), hlm.13-14.

partai dan yang paling mungkin untuk dijalankan adalah gerakan feminis.⁶⁶ Tujuan dari gerakan ini untuk menyumbang formasi suatu gerakan feminis nasional yang besar, berakar kuat di dalam rakyat yang meliputi mayoritas perempuan di Argentina, serta memperjuangkan martabat, kebebasan dan keadilan.⁶⁷

Perempuan dari arus nasional FIP dan perempuan tanpa afiliasi-afiliasi politik menciptakan AMA (*Association of Argentine Women* atau Asosiasi Perempuan Argentina) pada tahun 1977 untuk membaca dan mendiskusikan materi mengenai diskriminasi dan bertukar pengalaman pribadi. AMA berubah nama menjadi AMAS (*Alfonsina Storni Women's Association* atau Asosiasi Perempuan Alfonsina Storni). Program-program perjuangan kelompok disetujui pada tahun 1978, untuk mempersatukan perempuan yang bertujuan mengangkat status, meningkatkan semua partisipasi feminis di dalam pembangunan ekonomi dan untuk menjaga perdamaian.⁶⁸ Dalam rangka mencapai tujuan ini, AMAS mengeluarkan sebuah terbitan berkala yang mengorganisir konferensi dan pertunjukan film.

Pada tahun 1981, MLF diorganisir kembali di bawah kepemimpinan veteran Maria Elena Oddone dan menyebut dirinya OFA (*Argentine Feminis Organization*) atau Organisasi Feminis Argentina. OFA mencoba melobi partai politik untuk menjamin bahwa program perjuangan partai memasukkan berbagai tuntutan perempuan. Pada April 1982, ATEM November 25 (*Association para el Trabajo y el Estudio de la Mujer November 25* atau *Association for the Work and Study of Women November 25*) muncul sebagai sebuah gerakan otonom dengan tujuan memberi sumbangan bagi penciptaan masyarakat demokratis dan kesederajatan dunia, dimana perbedaan antar manusia tidak lagi menjadi sebuah alasan untuk melakukan penindasan, melainkan menjadi suatu basis bagi penghormatan atas pluralitas kehidupan.⁶⁹ Dieksekusi oleh perempuan dengan berbagai latar belakang usia, tingkatan pendidikan dan ekonomi, dengan tujuan spesifikasinya untuk perngorganisir kampanye, seminar dan presentasi sebelum

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 15.

⁶⁸ J.G. Schirmer, *Op.Cit.*, hlm.18.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.20.

pemerintah memenuhi CEDAW (*United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).⁷⁰

Pada Agustus 1983, Buenos Aires membuka pintunya bagi Ruang Perempuan atau *Lugar de la Mujer*. Perempuan *Lugar de la Mujer* mendefinisikan diri sebagai suatu asosiasi sipil karena kurangnya konsensus ideologis. Dengan orientasi feminis, *Lugar de la Mujer* menawarkan sebuah ruang bagi kegiatan-kegiatan yang berbasis feminis dan menawarkan penyuluhan hukum, seksual dan psikologi.⁷¹

Dua bulan kemudian, inisiatif dari tiga organisasi feminis Argentina (OFA, ATEM dan Libera) membentuk *Tribunal of Violence Against Women* (Pengadilan Kekerasan terhadap Perempuan). Tujuannya untuk mewaspadaan penduduk akan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, bukan hanya dari sudut pandang seksual, tetapi juga mengorganisir suatu demonstrasi untuk meminta keadilan dalam kasus perkosaan.⁷²

⁷⁰ Stephen L., "Gender, Citizenship and the Politics of Identity", *Latin American Perspectives*, Vol. 28, no. 6 (2001), hlm. 65.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 67.

⁷² *Ibid.*, hlm. 68.

BAB 3

PENCAPAIAN PERJUANGAN *LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO* MENUNTUT PERTANGGUNG JAWABAN PEMERINTAH SIPIL DALAM KASUS PELANGGARAN HAM *DIRTY WAR*

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai analisis gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan pada bab pertama. Bab ini juga menjabarkan perjuangan dari gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* selama dua puluh empat tahun terakhir dan hasil yang diperoleh dari perjuangan-perjuangan tersebut.

3.1 Perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* sebagai Gerakan Sosial yang Mengangkat Isu HAM

Gaetano Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer dan menggunakan kekerasan.⁷³ Hal ini nampak pada posisi militer dalam struktur pemerintahan Argentina. Selama tahun 1976-1983, pemerintah Argentina telah menciptakan konstruksi militer yang mengabaikan kontrol sipil secara demokratis. Akibatnya pelanggaran HAM terjadi secara masif pada masa ini, yang lebih dikenal dengan peristiwa *Dirty War*. Situasi yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang semakin meluas, memicu terbentuknya *Las Madres de la Plaza de Mayo* sebagai gerakan sosial yang eksistensinya masih diakui sampai saat ini.

Pada hakikatnya, gerakan sosial merupakan jawaban spontan maupun terorganisir dari masyarakat terhadap negara yang mengabaikan hak-hak rakyat, yang ditandai oleh penggunaan cara-cara di luar jalur kelembagaan negara atau bahkan yang bertentangan dengan prosedur hukum dan kelembagaan negara.

⁷³ Varma, *Op.Cit.*

Gerakan sosial juga bisa dilihat sebagai upaya bersama masyarakat yang hendak melakukan pembaharuan atas situasi dan kondisi sosial politik yang dipandang tidak berubah dari waktu ke waktu atau juga untuk menghentikan kondisi *status quo*.

Neidhardt dan Rucht menyatakan, sebuah gerakan sosial dapat dirumuskan sebagai sejumlah besar orang yang bertindak bersama atas nama sejumlah tujuan atau gagasan.⁷⁴ Biasanya gerakan ini melibatkan sejumlah orang yang relatif banyak dan biasanya berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan sosial sesungguhnya berangkat dari kesadaran kelompok orang atas kepentingannya. Hal ini nampak pada gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*. Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* adalah sebuah bentuk kesadaran politik kolektif dari warga negara Argentina yang berani memperjuangkan hak-hak politik kewarganegaraan untuk menuntut kebenaran dan keadilan agar ditegakkan sesuai dengan prinsip HAM yang berlaku secara universal.⁷⁵

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh PBB, Hak Asasi Manusia adalah hal-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁷⁶ Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup, karena tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang. Sedangkan dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dihilangkan oleh negara. Menurutnya, HAM merupakan sesuatu yang bersifat kodrati.⁷⁷

Ironisnya, hak yang melekat pada setiap manusia menurut *Teaching Human Rights* dan bersifat kodrati menurut John Locke, justru tidak dimiliki oleh warga Argentina yang menjadi korban penghilangan paksa pada peristiwa *Dirty*

⁷⁴ Neidhardt dan Rucht, *Op.Cit.*

⁷⁵ Jane Jaquette, *Women and Democracy: Latin American and central and Eastern Europe* (John Hopkins University Press, 1998), hlm. 35.

⁷⁶ Ubaedillah, *Op.Cit.*

⁷⁷ Locke, *Op.Cit.*

War. Pelanggaran HAM oleh pihak negara yang terjadi secara masif ini dapat diindikasikan dari salah satu dasar utama *Mastricht Guidelines*, dimana negara dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya untuk menghormati. Kewajiban ini menuntut negara, dan semua organ dan agen aparatnya untuk tidak bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok atau pelanggaran pada kebebasan mereka. Contoh dari jenis ini adalah tindakan seperti:⁷⁸

1. Pembunuhan di luar hukum (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);
2. Penahanan serampangan (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak individu untuk bebas);
3. Pelanggaran serikat buruh (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati kebebasan kelompok untuk berserikat);
4. Pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu (dalam pelanggaran atas kewajiban untuk menghormati hak-hak kebebasan beragama individu);

Keempat butir tindakan yang melanggar integritas individu atau kelompok tersebut terjadi pada peristiwa *Dirty War*, bahkan pembatasan atas praktek dari satu agama tertentu pun dilakukan. Walaupun butir ini dilakukan pemerintah semata-mata bukan sebagai tindakan diskriminatif suatu agama terhadap agama lain namun lebih disebabkan oleh kegiatan agama itu sendiri yang dianggap mencurigakan. Atas dasar kecurigaan ini pula pemerintah melanggar aktivitas serikat buruh dan serikat-serikat serupa. Tidak hanya melarang aktivitas agama dan serikat buruh, pemerintah juga melakukan pembunuhan secara masif terhadap oknum-oknum yang bersangkutan. Mayoritas korban ini sama sekali tidak tersangkut dengan tindakan terorisme seperti yang dituduhkan, namun mereka dibawa ke dalam sebuah ruangan yang dinamakan SDC (pusat penahanan rahasia) untuk kemudian ‘dihilangkan’.⁷⁹

Sebagaimana yang seringkali terjadi di berbagai tempat, apabila terjadi perang, konflik bersenjata atau hadirnya kekuasaan pemerintahan yang otoriter, akan selalu muncul “biaya-biaya sosial” yang dibayarkan dalam bentuk manusia

⁷⁸ Billah, *Op.Cit.*

⁷⁹ Laporan Final CONADEP, *Op.Cit.*

sebagai korban kekejaman pemerintahan otoriter tersebut. Perempuan menjadi kalangan yang paling rentan disamping anak-anak, dari segala bentuk kekerasan yang muncul dan berkembang. Banyak yang menganggap perempuan menjadi korban adalah suatu hal yang “wajar” dari suatu pertarungan sosial politik di satu negara atau antar negara. Kalangan perempuan hanya dilihat sebagai dampak yang ikut dan tidak bisa dihindari dari suatu proses sosial politik yang begitu cepat, mendalam dan tak terduga.

Pemerintahan militer di Argentina telah berpijak pada satu posisi yang menganggap bahwa kalangan perempuan telah diidentifikasi identitas pribadinya untuk kemudian dilihat siapa yang menurut pemerintah menjadi “musuh”nya. Artinya, ada upaya yang terorganisir dan sistematis, bahkan ada institusi di dalamnya untuk mengemban tugas tersebut. Maka sebagai konsekuensi logisnya, perempuan adalah subyek yang sangat rentan terhadap bentuk kekerasan yang ada, baik itu oleh masyarakat maupun kekuasaan negara. Dari sudut kekuasaan negara, ada dua pijakan yang dipakai untuk menjustifikasi tindakan kekerasan terhadap perempuan.⁸⁰ Pertama, budaya politik *Machismo* dan *Marianismo* yang digunakan oleh pemerintah sebagai cara untuk “menertibkan” dan “mengembalikan” perempuan ke dalam stratifikasi masyarakat. Budaya ini berkembang sejak masa penjajahan Spanyol dan terus berkembang dalam budaya politik negara bagian Amerika Latin. Kedua, kekerasan sebagai cara untuk menghadapi kelompok-kelompok oposisi yang menurut kalangan militer sebagai gerakan subversif dan komunis. Akibatnya, banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, baik itu terhadap pria maupun wanita.

Diluar kedua pijakan tersebut, negara sebagai pelaku kejahatan langsung mempunyai banyak motif untuk membenarkan tindakannya. Ketaatan terhadap penguasa pun disangkut-pautkan. Menurut Amnesty Internasional, pejabat militer telah menandatangani formulir yang menyetujui tindakan kekerasan. Dengan adanya formulir tersebut, maka pelaku segala tindakan kekerasan di Argentina dibebaskan dari hukuman. Rasa hormat mereka terhadap manusia sebagai

⁸⁰ Jane Jaquette, *The Women's Movement in Latin America: Feminism and Transition to Democracy* (San Fransisco: Westview Press, 1991), hlm. 97.

mahluk hidup pun lambat laun berkurang. Gadis remaja, biarawati, bahkan wanita hamil pun menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan.⁸¹

Persentase orang yang hilang akibat dari kebijakan junta militer sebelum dan sesudah pengambilalihan kekuasaan Argentina pada periode ini berada pada urutan tertinggi.⁸² Setelah kejatuhan rezim militer, CONADEP, sebuah komisi sipil pemerintah memperkirakan jumlah mereka yang hilang mendekati 11.000 jiwa. Sembilan ratus orang lainnya dibunuh atau “dihilangkan” oleh pasukan-pasukan maut, diantaranya adalah Triple A, yang dihubungkan dengan rezim Peronis sebelum kudeta. Gerilya bertanggung jawab atas pembunuhan sekitar 1.500 orang pada masa ini, ditambah hampir 1.800 penculikan. Masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia di Argentina semakin marak muncul ke permukaan ketika pada tahun 1983 terjadi transisi politik dari rezim militer menuju pemerintahan sipil.⁸³ Berbagai upaya terus dilakukan untuk menuntut keadilan akan peristiwa kelam dalam sejarah Argentina tersebut. Pada tahun 1986, gerakan ini terbagi menjadi dua golongan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi dalam melanjutkan perjuangan. Kelompok *Las Madres* di bawah pimpinan Bonafini menolak untuk dilakukannya identifikasi dan penguburan secara layak mayat-mayat korban kejahatan *Dirty War*. Menurut mereka, pemakaman erat kaitannya dengan kematian fisik dan spiritual. Mereka takut pemakaman akan menghancurkan memori yang telah lama ada di hati mereka dan dengan dilakukan pemakaman secara layak, maka sejarah pelanggaran HAM yang terjadi akan dilupakan. Mereka lebih memilih untuk membiarkan roh korban-korban yang hilang tetap hidup dengan ideologi politik yang menjadi dasar kelompok mereka.⁸⁴ Visi inilah yang membuat gerakan sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo* akhirnya terpisah menjadi dua.⁸⁵

⁸¹ Ervin Staub, *The Roots of Evil-The Origin of Genocide and Other Group Violence* (Cambridge University Press, 1989), hlm. 226.

⁸² Alfred Stepan, *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara lain* (Princeton: Princeton University Press, 1988), hlm. 38.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁸⁴ Antonius C.G.M. Robben, *Death Squad-The Anthropology of State Terror* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000), hlm. 107.

⁸⁵ “On The Water Front,” *Newsletter No. 14 of the Friends of the Irish* (2007). Diperoleh dari <http://www.iisg.nl/friends/newsletter-14.pdf>, Internet, diakses 2 April 2011.

1. *Association Mothers of Plaza de Mayo*

Golongan ini mempunyai motto “*todo es illusion menos el poder*” (semuanya adalah khayalan kecuali kekuatan).⁸⁶ Golongan yang dipimpin oleh Bonafini ini menganggap bahwa kekuatan harus dilawan dengan kekuatan. Golongan ini lebih bersifat politik dengan menginginkan perubahan yang lebih fundamental di Argentina. Tujuan dari pergerakan kelompok ini lebih berusaha untuk mengingatkan cerita sebenarnya pada periode *Dirty War*,⁸⁷ dimana kebenaran yang sebenarnya adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan ditutup-tutupi secara sengaja. Gerakan ini bersikeras untuk tidak melupakan sejarah kelam Argentina. Tidak ada istilah berdiskusi dengan pemerintah bagi mereka. Mereka menolak semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk kompensasi akan orang-orang yang hilang.

2. *Linea Fundadora Las Madres de la Plaza de Mayo*

Golongan ini hanya menginginkan keadilan, mencari tahu segala sesuatu yang menimpa sanak saudaranya yang hilang dan menuntut para pelaku kejahatan *Dirty War* agar segera diadili. Golongan ini menganggap semuanya bukan mengenai tidak setuju atau setuju dan bukan untuk memberontak terhadap pemerintah, tetapi semuanya dapat didiskusikan secara bersama-sama. Apabila pemerintah memberikan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan keinginan *Las Madres*, maka pemerintah tersebut patut untuk diberi pujian. Namun apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka *Las Madres* akan melobi pemerintah. *Las Madres de la Plaza de Mayo* menganggap bahwa gerakan mereka bukan sebagai partai politik namun lebih kepada keinginan untuk mengetahui keberadaan orang-orang yang hilang, pengadilan bagi oknum-oknum yang bertanggung jawab selama periode *Dirty War*, secara terus-menerus berjuang untuk penegakkan hak asasi manusia di Argentina serta menghapuskan undang-undang impunitas yang melindungi pelanggaran hak asasi manusia seperti *La Ley de Punto Final* dan *The Law of Due*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Tifa Asrianti, “Mothers of Plaza de Mayo: Justice for Dissapeared Loved Ones, One Step at a (long Time,” diperoleh dari <http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/26/mothers-plaza-de-mayo-justice-disappeared-loved-ones%C2%A0one-step-a-long-time.html>, Internet, diakses 18 Maret 2011.

Obdience, dimana undang-undang ini tidak konstitusional dan melanggar hukum internasional.⁸⁸

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa jenis gerakan sosial yang dilakukan oleh *Las Madres de la Plaza de Mayo* adalah gerakan protes. Walaupun pada perkembangannya, *Las Madres* mengalami perubahan pada visi dan misi gerakan namun konsistensi gerakan protes *Las Madres* terus berlangsung selama 32 tahun. Gerakan protes adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Gerakan protes merupakan jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara berkembang.⁸⁹

Untuk itulah selama 24 tahun, *Las Madres* telah menunjukkan kemampuan besar dalam merespon berbagai kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi kebenaran dan keadilan. Berbagai upaya dilakukan oleh *Las Madres* untuk memperjuangkan penegakan HAM di Argentina. *Las Madres de la Plaza de Mayo* terus melakukan upaya-upaya dalam menuntut penegakan keadilan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh rezim militer pada peristiwa *Dirty War*.

Metode perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* pada mulanya dianggap sepele karena mereka hanya sekelompok ibu-ibu rumah tangga biasa dalam suatu masyarakat yang patriarkis dan nyaris tidak memiliki latar belakang kemampuan politik yang memadai.⁹⁰ Awalnya para peserta berkumpul di Plaza de Mayo karena kesamaan tujuan, yaitu untuk mencari tahu keberadaan sanak saudara yang hilang tanpa ada maksud untuk berkonfrontasi. Lewat gerakan simbolik itu pula jeritan hati pengalaman subjektif *Las Madres de la Plaza de Mayo* bertransformasi menjadi suara perlawanan yang tidak terdengar namun selalu mengusik eksistensi penguasa tiran di Argentina.

Pemisahan peran dan wilayah peran antara laki-laki dengan wilayah publiknya dan perempuan dengan wilayah privatnya merupakan sebuah kondisi nyata di Argentina. Wilayah privat adalah lingkup yang diidentikkan dengan

⁸⁸ “Madres de Plaza de Mayo: Linea Fundadora,” diperoleh dari http://www.memoriaabierta.org.ar/eng/quienes_somos.php#014, Internet, diakses 18 Maret 2011.

⁸⁹ Davis, *Op.Cit.*

⁹⁰ Bruce Allen, “Argentina: The Mothers of The Plaza de Mayo,” diperoleh dari <http://www.labournet.net/world/0001/mum1.html>, Internet, diakses 25 Februari 2011.

perempuan dengan segala peran reproduksi dan pengasuhan anak yang diletakkan pada dirinya. Sedangkan wilayah publik adalah lingkup yang diidentikkan dengan laki-laki, segala hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan reproduksi dan pengasuhan anak akan berada di dalamnya, seperti misalnya pencapaian prestasi atau struktur politik, sosial dan ekonomi yang hirarkis.⁹¹ Walaupun pada saat itu konteksnya masyarakat Argentina menganut budaya patriarkis, ibu-ibu tersebut ternyata mampu bertransformasi peran privatnya sebagai ibu rumah tangga menjadi figur publik yang berjuang demi kepentingan publik nasional yang lebih luas.

3.2 Pencapaian *Las Madres de la Plaza de Mayo* 1983-2007

Pada masa kekuasaan junta militer (1976-1983), *Las Madres* melakukan berbagai tindakan untuk mencari tahu keberadaan suami dan anak-anaknya. Namun dalam perkembangannya, gerakan ini menjadi simbol pergerakan masyarakat sipil yang mampu menguak kejahatan junta militer. Dengan bantuan Komisi Hak-hak Asasi Manusia PBB, pada tanggal 29 Februari 1980 didirikan sebuah Kelompok Kerja tentang penghilangan paksa, yang dibebani tugas untuk mengumpulkan bukti dan dokumentasi. Tindakan-tindakan PBB selanjutnya, bersama-sama dengan tindakan masing-masing negara dan tentu saja *Las Madres de la Plaza de Mayo*, terbukti berpengaruh. Sejak tahun 1979, kasus penghilangan orang secara paksa menjadi lebih jarang terjadi dan benar-benar berhenti pada tahun 1980, yang notabene sebelum jatuhnya kediktatoran di Argentina.⁹² Sebagian besar dari pelaku kejahatan HAM masa lalu yang menjadi sasaran pengadilan HAM internasional masih berada di Argentina, kecuali Ricardo Miguel Calvallo yang ditahan di Meksiko dan kemudian diekstradisi ke Spanyol serta Adolfo Seilingo yang pada tahun 1997 secara sukarela datang ke Spanyol untuk memberi kesaksian tentang kekejaman junta militer.⁹³ Sekurang-kurangnya, manifestasi yang paling gawat dari praktik-praktik mereka yang menjijikkan itu pada akhirnya telah berhasil.

⁹¹ Chapman, *Op.Cit.*

⁹² Antonio Cassesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah* (Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 191.

⁹³ *Ibid.*

Pasca kejatuhan junta militer tahun 1983, sistem demokrasi yang dijalankan oleh pemerintahan sipil Argentina tidak sesuai dengan harapan masyarakat, khususnya gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo*. Tokoh dan figur yang dianggap bertanggung jawab dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM masih banyak dan belum diproses secara hukum. Wilayah isu yang mengandung potensi konflik amat tinggi antara pemerintahan sipil dengan militer (selain isu perombakan struktur, misi, fungsi, kontrol sipil, dan anggaran) adalah bagaimana rezim yang baru menangani warisan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim militer. Tidak jarang penanganan pelanggaran HAM warisan masa lalu di Argentina berujung pada keputusan untuk melepaskan pelaku dari hukuman.

Pemerintah sipil pasca jatuhnya junta militer, mulai dari Raul Alfonsin, Carlos Menem maupun Fernando de la Rúa ternyata tidak mampu membuat kehidupan masyarakat Argentina menjadi lebih maju, bahkan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM pada peristiwa *Dirty War* sekalipun. Pada periode pemerintahan sipil ini, *Las Madres* tetap konsisten dengan upaya-upayanya menekan pemerintah agar tercipta keadilan. Keadilan yang dimaksud disini diutamakan bagi para korban kasus pelanggaran HAM, dengan menuntut pemerintah untuk menangkap, mengadili dan menghukum para pelaku kejahatan HAM pada peristiwa *Dirty War*.

Gerakan *Las Madres de la Plaza de Mayo* mempertahankan rutinitas mengelilingi Plaza de Mayo setiap hari Kamis sebagai tindakan simbolik menolak ketidakadilan dan kekerasan di Argentina. Musuh dari gerakan ini bukan lagi presiden yang sedang menjabat namun penyiksaan, pembunuhan, pemusnahan oleh rezim militer yang dijatuhkan pada pertengahan tahun 1980-an, serta penerapan perencanaan ekonomi yang pada akhirnya menyeret masyarakat Argentina ke dalam kehidupan yang sulit. Ketidakadilan terus berlangsung dan kesenjangan sosial semakin nyata. *Las Madres* dengan segala upayanya mencari bantuan dari dunia internasional dan organisasi-organisasi HAM untuk menekan pemerintah dalam menuntut keadilan.

3.2.1 Masa Pemerintahan Raul Alfonsin (1983-1989)

Raul Alfonsin adalah presiden pertama Argentina yang terpilih melalui pemilihan umum pasca jatuhnya junta militer. Jabatan presiden yang diemban menghadapkannya pada institusi militer yang masih punya peran kuat dan perangkat demokrasi yang masih sangat rapuh. Isu penanggulangan kasus pelanggaran HAM menjadi isu utama pada masa pemerintahan Alfonsin. Upaya Raul Alfonsin diawali dengan membatalkan “undang-undang penenangan nasional”, sebuah undang-undang pengampunan dalam menghapus segala tindakan yang telah dilakukan dalam upaya *Dirty War* dalam menentang subversi, yang telah disahkan junta militer tanggal 22 September 1983, tidak lama sebelum menyerahkan kekuasaan kepada rezim demokratis.⁹⁴

Pada kenyataannya, kebijakan-kebijakan Raul Alfonsin selama masa pemerintahannya memberikan kekecewaan bagi *Las Madres* terutama dalam penegakan keadilan akan kasus pelanggaran HAM pada peristiwa *Dirty War*. Alfonsin menyatakan untuk menjalankan proses hukum legal militer terhadap para petinggi junta militer.⁹⁵ Dalam proses tersebut, ditekankan bahwa semua pihak yang merencanakan, mengendalikan dan mengorganisir represi wajib mendapat hukuman. Maka pada tahun 1984, Alfonsin membentuk CONADEP (*La Comision Nacional Sobre la Desaparicion de Personal*) atau Komisi Nasional Orang Hilang, yang terdiri dari tokoh-tokoh terkenal dan diketuai oleh penulis Ernesto Sabato. CONADEP bertanggung jawab atas penyelidikan orang-orang yang hilang dan bertugas untuk mengumpulkan bukti dari orang-orang yang hilang dan melaporkannya dalam jangka waktu sembilan bulan. Dalam kurun waktu tersebut, CONADEP berhasil mengumpulkan hampir 9.000 kasus penghilangan yang belum tuntas.⁹⁶ Di tahun yang sama, CONADEP berhasil membuat sebuah laporan yang berjudul *Nunca Mas (Never Again)* yang berisi daftar korban serta lokasi-lokasi penahanan, dimana warga sipil disiksa dan dibunuh ketika junta militer berkuasa.⁹⁷

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Martin Edwin Andersen, *Dossier Secreto: Argentina's Desaparecidos and the Myth of The Dirty War* (Westview Press, 1993), hlm. 137.

⁹⁶ Alison Brysk, *The Politics of Human Rights in Argentina: Protest, Change, and Democratization* (California:Stanford University Press, 1994), hlm. 70.

⁹⁷ Laporan Final CONADEP, *Op.Cit.*, hlm. 265.

Alfonsin berhasil menangkap enam orang mantan petinggi junta militer atas pelanggaran yang mencakup pembunuhan, penyiksaan, penahanan di luar hukum, perampokan, kekerasan dan intimidasi dengan vonis hukuman penjara empat tahun sampai dengan seumur hidup.⁹⁸ Dalam menjalankan usahanya, CONADEP bekerjasama dengan *Grandmothers of the Plaza de Mayo*, sebuah gerakan perempuan yang anak dan cucunya hilang selama masa pemerintahan junta militer dengan dibantu oleh *Science and Human Rights Program* dan *American Association for the Advancement of Science*.⁹⁹ Dr. Clyde Snow, ahli antropologi forensik yang dikirim oleh pihak *American Associations for the Advancement of Science* ke Argentina, bekerjasama dengan para arkeolog, antropolog serta psikiater dari *Argentine Forensic Anthropology Team*.¹⁰⁰ Kelompok ini dilatih dengan tehnik antropologi forensik tradisional untuk mengidentifikasi sisa-sisa mayat korban yang dihilangkan sehingga dapat membantu proses dokumentasi dan penyelidikan kejahatan HAM di masa lalu, serta mengidentifikasi korban demi kepentingan keluarga korban.¹⁰¹

Sebelum bekerjasama dengan *Science and Human Rights Program* dan *American Associations for the Advancement of Science*, CONADEP dan *Grandmothers of the Plaza de Mayo* mengumpulkan bukti-bukti dengan menggunakan jasa dokter, namun para dokter yang terlibat memiliki sedikit pengalaman dalam menganalisis tengkorak korban. Sementara itu, banyak ahli forensik yang masih merupakan bagian integral dari kepolisian dan berada di bawah pengaruh kuat sistem hukum yang berkuasa sebelumnya.¹⁰²

Tindakan penting selanjutnya yang diambil oleh Alfonsin adalah memperbaiki Kode Keadilan Militer Argentina dengan membatasi kompetensi

⁹⁸ Termasuk disini mantan Presiden dan Panglima Angkatan Darat Argentina, Jorge Videla, Panglima Angkatan Laut dan Angkatan Udara, masing-masing Emilio Massera dan Orlando Agosti; mantan presiden dan panglima Angkatan Darat, Leopoldo Galtieri, Panglima Angkatan Laut dan Angkatan Udara, masing-masing Jorge Anaya dan Basilio Iami Dozo. Sedangkan para pimpinan Junta Militer (kedua), Mantan Presiden dan Panglima Angkatan Darat, Roberto Viola, Panglima Angkatan Laut dan Angkatan Udara, masing-masing Armando Lambruschini dan Omar Grafigna mendapatkan hukuman yang lebih ringan.

⁹⁹ "Jurnal Cutler," diperoleh dari <http://www.gwu.edu/~uwp/fyw/euonymous/2004-2005/Cutler.pdf>, Internet, diakses 11 April 2011.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Rebecca Lichtenfeld dan Leonardo Filippini, *Accountability in Argentina, 20 years later, Transitional Justice Maintains Momentum* (ICTJ, 2005), hlm.2.

¹⁰² Doretti, *Op.Cit.*

pengadilan militer dan memperbolehkan naik banding di depan pengadilan pidana federal terhadap putusan yang diberikan “Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata”. Berdasarkan perundang-undangan ini, tanggal 22 April 1985, dimulailah pengadilan untuk mengadili sembilan orang jendral, anggota tiga junta yang pertama. Namun proses pengadilan tidak dilanjutkan karena perintah yang menjadi dasar tindakan para pemimpin militer di masa kediktatoran sifatnya “tidak dapat dibantah”.¹⁰³

Pada tahun 1986-1987, Argentina berada di bawah ancaman pemberontakan militer. Perasaan tidak puas yang semakin berkembang di kalangan militer, serta bahaya-bahaya besar yang dihadapi demokrasi Argentina telah mendorong Alfonsin untuk menangani pemberontakan militer tersebut dengan mengeluarkan dua undang-undang impunitas yang disebut *La Ley de Punto Final (The Full Stop Law)* dan *La Ley de Obediencia Debida (The Law of Due Obedience)*.¹⁰⁴ Pembentukan *The Full Stop Law* merupakan upaya menghentikan penyelidikan maupun pengadilan militer, sedangkan *The Law of Due Obedience* merupakan upaya agar semua pejabat dan bawahan militer termasuk anggota militer dan kepolisian tidak dapat dihukum atas kejahatan yang dilakukan selama kekuasaan junta militer sebagai tindakan untuk menaati perintah dari atasan militer. Kedua undang-undang ini adalah anti klimaks dari proses pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM yang sebenarnya sudah dimulai sejak penyelidikan CONADEP.

Las Madres de la Plaza de Mayo melakukan aksi demonstrasi menentang berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk tidak menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa *Dirty War* melalui *The Full Stop Law* dan *The Law of Due Obedience*. *Las Madres* bersama organisasi HAM lainnya melakukan aksi demonstrasi di Plaza de Mayo untuk menuntut penghapusan dua undang-undang tersebut, agar anggota junta militer yang menjadi pelaku pelanggaran HAM dapat diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal.¹⁰⁵ Belajar dari pengalaman sebelumnya, gerakan ini sadar bahwa sangat sukar untuk menuntut kebenaran dan keadilan bagi para pelaku pelanggaran HAM

¹⁰³ Cassesse, *Op.Cit.*, hlm. 197

¹⁰⁴ Doretto, *Op.Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

tanpa tindakan perlawanan. Oleh karena itu, *Las Madres* melanjutkan perjuangan melalui demonstrasi dengan slogan “*Jail to Those Who Have Committed Genocide*” dan “*Judgement and Punishment for All Culprits*”. Slogan ini digunakan untuk tetap memperjuangkan isu penghilangan yang terjadi pada peristiwa *Dirty War*.¹⁰⁶

Upaya demonstrasi ini dilakukan *Las Madres* untuk menekan pemerintahan Alfonsin agar tidak menelantarkan kasus pelanggaran HAM yang membuat Raul Alfonsin mengalami dilema. Di satu sisi, Alfonsin terus dihadapkan pada aksi-aksi penolakan, namun di sisi lain kedudukannya terancam karena adanya usaha intervensi dari pihak militer. Ketidakmampuan Alfonsin dalam mengatasi krisis ekonomi di Argentina membuat dirinya tidak lagi terpilih dalam pemilu berikutnya.

3.2.2 Masa Pemerintahan Carlos Menem (1989-1990)

Pada tahun 1989, Carlos Menem terpilih menjadi presiden Argentina periode berikutnya. Menem menjabat sebagai presiden selama dua periode dan pada periode ketiga Menem sudah tidak lagi dipercaya oleh masyarakat karena kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Sempat terjadi pemberontakan militer terhadap pemerintahan militer, namun tidak berlangsung lama karena Menem secara resmi memberlakukan hukum pengampunan bagi para pelaku kejahatan HAM.

Selanjutnya, kesiapan intervensi yang serius dari pihak militer tidak lagi nampak. Menyadari akan keadaan tersebut, Menem kemudian membentuk aliansi dengan militer serta memberikan berbagai kedudukan sipil sebagai bentuk penghargaan terhadap militer.¹⁰⁷ Meskipun pemerintahan Menem kurang mencerminkan demokrasi, namun politik militernya dapat diinterpretasikan sebagai usaha dalam membentuk ikatan dengan militer. Strategi yang dijalankan oleh Menem berhasil mempertahankan kekuasaan politiknya, walaupun hanya berlangsung selama dua kali periode kepemimpinan karena tindakan ini pada akhirnya mengecewakan warga Argentina dengan menutup berbagai

¹⁰⁶ Allen, *Op.Cit.*

¹⁰⁷ Stephen Brown, “Argentine Mothers mark 20 years fighting injustice,” diperoleh dari <http://www.mosquionet.com/~prewett/twentyyearsfight.html>, Internet, diakses 2 April 2011.

kemungkinan untuk menuntut keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu yang pada awalnya cukup terbuka. Sampai dengan tahun 1990, hanya 10 orang yang berhasil dihukum.¹⁰⁸ Sebagian besar pelaku diberi pengampunan dan dibebaskan.

Selama masa pemerintahan Carlos Menem, ada dua tindakan besar yang dilakukan oleh *Las Madres*, antara lain:

1. Mencari Dukungan dari Dunia Internasional

Pengampunan yang dibuat oleh Menem ternyata tidak disetujui oleh lebih dari 80% penduduk Argentina. Pada bulan Desember 1990, lebih dari 80.000 orang berdemonstrasi di Plaza de Mayo sebagai aksi penolakan akan adanya pengampunan bagi para pelaku kejahatan HAM masa lalu.¹⁰⁹ *Las Madres de la Plaza de Mayo* terus menekan pemerintahan Menem untuk menghapus undang-undang pengampunan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, *Las Madres* bekerja sama dengan berbagai organisasi hak asasi manusia. Pada masa pemerintahan Menem, *Las Madres* semakin fokus dalam mengeratkan hubungan kerja sama yang sudah terjalin sebelumnya dengan organisasi-organisasi HAM.

Pengaruh yang diberikan oleh *Las Madres* sebagai salah satu gerakan sosial yang aktif di Argentina diperkuat oleh eksistensi “rezim hak asasi internasional” yang lebih besar dari jumlah negara konstituen, organisasi-organisasi internasional, dan organisasi-organisasi non-pemerintah. Rezim hak asasi internasional ini menyusun semacam jaringan informasi dan prinsip “moral yang saling bergantung” yang membantu menyebarkan perhatian dari gerakan hak asasi dalam melintasi batas regional.¹¹⁰ *Las Madres* sendiri, baik *Association of Mothers* maupun *Linea fundadora*, seringkali melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memberikan pidato tentang Hak Asasi Manusia.¹¹¹

¹⁰⁸ Marguerite Guzman Bouvard, *Revolutionizing Motherhood: The Mothers of The Plaza de Mayo* (Bedford, NH: Igneus Press 1994), hlm. 251.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 252.

¹¹⁰ Brysk, *Op.cit.*, hlm. 52.

¹¹¹ Elizabeth Borland, “The Mature Resistance of Argentina’s Madres de Plaza de Mayo,” dalam *Latin American Social Movements-Globalization, Democratization, and Transnational Networks*, ed. Hank Johnston and Paul Almeida, 115-130. (Rowman and Littlefield Publishers, inc.:2006), 115.

Aktor-aktor internasional memberikan bantuan nyata kepada *Las Madres* dengan informasi konkret dan sumber daya yang dibutuhkan. Awal komunikasi *Las Madres* dengan luar negeri atas saran dari jurnalis asing, dan sebuah kelompok dari Belanda membantu biaya pembelian gedung sebagai tempat rapat.¹¹²

Oleh karena itu, tuntutan terhadap penghapusan undang-undang pengampunan terus meningkat pada tahun 1990-an. Negara-negara di luar Argentina seperti Spanyol, Italia, Swedia, Prancis dan Jerman juga mulai menuntut ekstradisi dari para perwira militer yang bertanggung jawab atas penghilangan warga sipil. Italia dan Prancis bahkan telah melakukan sidang *in absentia*. Sayangnya otoritas hukum di Argentina telah menyangkal keabsahan dari persidangan *in absentia* ini karena menurut mereka persidangan ini berlawanan dengan konstitusi di Argentina, terutama pasal yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membela dirinya di dalam persidangan, baik dengan didampingi pengacara maupun tidak.¹¹³ Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menem ada tahun 1998, bahwa negara-negara yang telah melakukan persidangan *in absentia* mengabaikan otoritas pemerintah Argentina. Tahun berikutnya, tepatnya pada bulan November 1999, Jaksa Baltazar Garzon dari *Fifth Central Court* di Madrid membuat tuntutan hukuman terhadap 98 orang perwira angkatan bersenjata Argentina atas kejahatan genosida dan terorisme.¹¹⁴ *Las Madres* meminta dukungan lembaga-lembaga internasional untuk menekan pemerintah lokal agar segera mengadili para pelaku kejahatan HAM masa lalu. Lembaga internasional seperti PBB dan *Inter-American Human Rights Commission* membantu *Las Madres* dalam menekan pemerintah untuk melaksanakan proses hukum.¹¹⁵ Badan yang paling bebas dan berani dalam sistem PBB, yaitu Sub-Komisi tentang Pencegahan Diskriminasi dan Penjagaan Minoritas telah menyetujui

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Pengadilan *in absentia* adalah sebagai upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ "Mothers of Plaza de Mayo a 30-year Symbol of Human Rights," diperoleh dari http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/todaysfeatures/2007/April/todaysfeatures_April154.xml§ion=todaysfeatures, Internet, diakses 21 Maret 2011.

sebuah resolusi mengenai masalah di Argentina meskipun merupakan sebuah resolusi yang sangat lemah.

2. Upaya Mencari Pengakuan, Menuntut Pengadilan Hukum dan Penahanan Para Pelaku

Las Madres mendesak *Human Rights Office of the Interior Ministry* untuk terus melanjutkan usahanya menemukan data-data sejarah masa lalu. Sebagian besar informasi diperoleh dari kesaksian para korban serta keluarga-keluarga korban. Pengampunan hukum yang diberikan oleh pengadilan terhadap para pelaku kejahatan HAM masa lalu mendorong banyak organisasi hak asasi manusia termasuk *Las Madres* untuk mencari kemungkinan-kemungkinan lain di dalam sistem hukum. Beberapa perwira kelas menengah militer Argentina yang merasa dijadikan kambing hitam mulai mengakui peran serta dan tanggung jawab dalam kejahatan HAM masa lalu. Pengakuan-pengakuan yang mulai muncul dari para pelaku kejahatan HAM masa lalu ini semakin mendorong *Las Madres* untuk menekan pemerintah mengadili para pelaku secara hukum.

Seiring dengan pengakuan dari para pelaku yang terus bertambah jumlahnya, *Las Madres de la Plaza de Mayo* dan *Center for Legal and Social Studies* di Argentina bersama dengan masyarakat sipil menuntut pemerintah membuka proses hukum baru. *Las Madres* berpendapat bahwa warga negara berhak untuk mengetahui tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada keluarga mereka yang hilang. *Las Madres* juga menuntut pemerintah untuk menyelidiki beberapa kasus penting secara lebih mendalam.

Las Madres menyampaikan pengaduan ke *Federals Appeal Court* di Buenos Aires.¹¹⁶ Akan tetapi, lembaga tersebut hanya memiliki otoritas untuk interogasi tersangka pelaku kejahatan HAM masa lalu untuk memberikan pengakuan dan tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku. *Federals Appeal Court* membuka kesempatan untuk penyelidikan secara mendalam atas kejahatan HAM masa lalu namun proses hukum

¹¹⁶ “International Commission Of Jurists; Amnesty International; Watch Human Rights and Correctional Argentina 2001,” diperoleh dari <http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR130122001?open&of=ENG-2M>, Internet, diakses 3 Mei 2011.

masing-masing pelakunya terus tertunda karena keterbatasan otoritas lembaga federal ini pada proses penyelidikan dan dokumentasi.¹¹⁷ *Inter-American Commission on Human* mendorong Argentina untuk menyetujui jaminan hak perolehan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada korban penghilangan paksa. Informasi yang dikumpulkan oleh lembaga federal ini nantinya menjadi sumber data yang bernilai bagi proses hukum kejahatan HAM masa lalu.

Kesimpulan yang diperoleh dari penyelidikan ini terbilang aneh. Banyak bayi yang dilahirkan di dalam kamp-kamp dicuri untuk diadopsi secara ilegal oleh pasangan lain sehingga bayi-bayi tersebut kehilangan identitas aslinya. Walaupun kasus-kasus semacam ini tidak mendapat banyak sorotan, namun melalui dukungan masyarakat sipil maka pada tahun 1992 Menem membentuk CONADI (*National Commission for the Right to Identity*), yang beranggotakan perwakilan dari *Las Madres de la Plaza de Mayo*, pengacara, jaksa penuntut, serta organisasi-organisasi HAM yang terkait. Tujuan didirikannya CONADI adalah mencari anak-anak yang dihilangkan identitasnya pada masa pemerintahan junta militer.¹¹⁸ Para perwira yang berkuasa selama junta militer nampaknya bebas dari tuntutan atas nasib korban penghilangan, namun mereka tetap dijerat hukuman atas tuduhan penculikan bayi-bayi dan pemalsuan identitas bayi-bayi tersebut.¹¹⁹

3.2.3 Masa Pemerintahan Fernando de la Rúa (1999-2001) dan Lima Presiden dalam 15 Hari (20 Desember 2001-3 Januari 2002)

Pada periode ini, perekonomian di Argentina sedang dalam masa-masa sulit. Pemerintahan Fernando de la Rúa hanya berlangsung selama dua tahun. Pada tanggal 19 dan 20 Desember 2001, *Las Madres de la Plaza de Mayo* bersama dengan demonstran lainnya bergabung untuk melakukan unjuk rasa atas kekecewaan mereka terhadap manajemen ekonomi pemerintah yang dianggap

¹¹⁷ International Commission Of Jurists; Amnesty International; Watch Human Rights and Correctional Argentina 2001, *Op.Cit.*

¹¹⁸ Jackie Roddick, *The Dance of The Millions: Latin America and the Debt Crisis* (London: Latin America Bureau, 1988), hlm. 19

¹¹⁹ "Falklands/ Malvinas War", diperoleh dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm>, Internet, diakses 02 Maret 2011.

tidak akuntabel. Pada hari kedua, de la Rúa resmi mengundurkan diri dari jabatannya.¹²⁰

Pasca kemunduran Fernando de la Rúa dari kursi kepresidenan, selama 15 hari berikutnya (20 Desember 2001-3 Januari 2002) terjadi lima kali pergantian presiden di Argentina. Reformasi yang dimulai sejak tahun 1983 pun seperti tidak ada artinya.¹²¹ Kongres mengangkat Ketua Senat Ramon Puerta untuk menggantikan posisi de la Rúa karena Wakil Presiden Carlos Alvarez sudah lebih dulu mengundurkan diri pada tahun 2000. 48 jam kemudian, kongres mengadakan sidang selama tidak kurang dari 15 jam dan menetapkan Gubernur Propinsi San Luis, Adolfo Rodríguez Saa sebagai pengganti de la Rúa.¹²²

Setelah terpilih secara resmi, presiden Rodríguez Saa menyatakan ketidaksanggupannya membayar hutang luar negeri. Ini merupakan pernyataan besar dalam sejarah Argentina. Maka Adolfo Rodríguez tercatat hanya menjabat sebagai presiden sejak 23 Desember 2001 hingga 1 Januari 2002. Ketua Senat, Ramon Puerta yang menurut konstitusi berhak menggantikan posisi kepresidenan sementara karena kekosongan posisi wakil presiden langsung menyatakan mundur. Situasi sulit ini memaksa Ketua DPR Eduardo Duhalde mengambil alih kursi kepresidenan sementara selama 48 jam berikutnya.¹²³ Tepat pada pergantian tahun 2002, Senator Eduardo Duhalde terpilih menjadi presiden kelima Argentina dalam kurun waktu dua minggu. Eduardo Duhalde menyambut pemilihan dirinya sebagai presiden dengan pernyataan “Argentina bangkrut”.¹²⁴

Pada masa ini penghapusan undang-undang impunitas tetap menjadi tuntutan gerakan *Las Madres*. Walaupun Pemerintah Argentina sedang memfokuskan diri pada permasalahan ekonomi karena situasi di Argentina yang semakin terpuruk akibat demonstrasi, kerusuhan dan aksi sosial yang terjadi dimana-mana untuk menuntut kestabilan ekonomi, hal ini tidak membuat gerakan

¹²⁰ Borland, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹²¹ Andres Gaudin, “Faktor Kirchner,” diperoleh dari <http://www.nefos.org/?q=node/30>, Internet, diakses 13 April 2011.

¹²² Kenneth M. Roberts, “Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations,” *American Political Science Review* (1999). Diperoleh dari www.findarticles.com, Internet, diakses 2 Mei 2011.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ “The Return of The State in Argentina,” diperoleh dari http://www.chathamhouse.org.uk/files/9180_110507argentina.pdf, Internet, diakses 3 Mei 2011.

Las Madres de la Plaza de Mayo menyerah. Mereka terus berusaha agar pemerintah tidak melupakan kasus pelanggaran HAM yang menjadi sejarah kelam di Argentina. Ketika itu aksi demonstrasi terus meningkat, ditambah lagi dengan partisipasi aktif *Las Madres* dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam aksi-aksi demonstrasi. Selain itu, *Las Madres* bersama organisasi-organisasi lainnya seperti CELS dan *Asamblea Permanente por los Derechos Humanos* memobilisasi massa untuk mengkonfrontasi pemerintah dengan mengandalkan kesaksian para korban serta analisis-analisis hukum yang mereka rumuskan.

Situasi ini tidak membuat pemerintah Argentina dari Fernando de la Rúa hingga Duhalde menyetujui ekstradisi warganya untuk diadili di pengadilan internasional. Para pelaku kejahatan HAM masa lalu yang menjadi sasaran pengadilan HAM internasional sebagian besar masih berada di Argentina. De la Rúa bahkan pernah menyatakan bahwa tuntutan semacam itu tidak berlaku di Argentina. Tiga hari sebelum pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan, de la Rúa menandatangani dekret 1581 yang berisi tentang penolakan terhadap HAM internasional di Argentina dengan alasan teritorialitas.¹²⁵

Las Madres mempunyai peran yang sangat penting dalam proses perwujudan keadilan di Argentina. Selain upaya dalam bentuk investigasi, *Las Madres* bersama para aktivis HAM di Argentina juga melakukan tindakan inisiatif lainnya seperti membangun monumen, taman kota, melestarikan dokumen-dokumen serta membuat 'bank' data tentang apa yang sesungguhnya terjadi di masa lalu.¹²⁶ Gerakan ini berjuang mati-matian melawan upaya pemerintah untuk melupakan masa lalu Argentina. Melalui data-data yang berhasil dikumpulkan, pada tahun 2001 Hakim Federal Argentina, Jaksa Gabriel Cavallo menyatakan bahwa *The Due Obedience Law* dan *Full Stop Laws* tidak sesuai dengan hukum konstitusi yang berlaku di Argentina. Oleh karena itu, sah bagi hukum internasional untuk mengambil alih otoritas hukum di Argentina yang tidak lagi berfungsi. Cavallo menekankan bahwa pengampunan terhadap para pelaku kejahatan HAM masa lalu sangat berlawanan dengan kewajiban pemerintah Argentina untuk mengadili mereka seperti yang tercantum di dalam konstitusi.

¹²⁵ Leonardo Filippini, "Criminal Prosecutions for Human Rights Violation in Argentina", diperoleh dari <http://www.ictj.org/images/content/5/2/525.pdf>, Internet, diakses 4 Mei 2011.

¹²⁶ *Ibid.*

Walaupun keputusan tersebut harus mendapat legitimasi dari Mahkamah Agung, namun disambut baik oleh kalangan hak asasi manusia Argentina karena telah membuka peluang untuk mengadili perwira dan tentara yang terlibat dalam aksi junta militer pada tahun 1976 hingga 1983.¹²⁷

Pada tahun 2002, pernyataan Calvallo tersebut dibenarkan oleh *Federal Court for Buenos Aires* maka pada tahun 2003 Kongres menghapus *The Law of Due Obedience* dan *The Full Stop Laws* dengan alasan kedua undang-undang tersebut tidak valid. Keduanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sudah menjadi kewajiban tiap negara untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.¹²⁸

Pada tahun 2001 sampai 2003, *Las Madres* disibukkan dengan kegiatannya dengan aktivis-aktivis lain dalam merespon krisis ekonomi dan politik yang sedang melanda Argentina.¹²⁹

3.2.4 Masa Pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez Kirchner (2003-2007)

Pada bulan Mei 2003, Nestor Kirchner terpilih menjadi presiden. Kirchner merupakan pribadi yang beraliran kiri namun sangat menghargai hukum.¹³⁰ Kirchner mengganti seluruh teknokrat pro barat (pro IMF) dan selalu menekankan mengenai pentingnya pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan. Pada masa pemerintahan Nestor Kirchner, sekitar 11 juta rakyat Argentina bangkit dari kemiskinan berkat pertumbuhan ekonomi sebesar 50%.

Di bawah pemerintahan Nestor Kirchner, Argentina mengalami kemajuan yang pesat. Prediksi bahwa Argentina akan jauh lebih terpuruk ternyata tidak terbukti, Argentina justru semakin berkembang tanpa suntikan dana dari IMF dan investor asing. Prestasi Kirchner yang paling mengagumkan adalah kebijakan-kebijakan yang sangat dibanggakan oleh *Las Madres* dan aktivis-aktivis HAM di Argentina. Kirchner membuat suatu agenda politik yang dinamakan "*Justice for*

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ Borland, *Op.Cit.*, hlm. 124.

¹³⁰ "Dark Years: Argentina's Military Dictatorship," diperoleh dari <http://www.whatargentina.com/argentina-military-dictatorship.html>, Internet, diakses 22 Maret 2011.

the Crimes of the Dictatorship". Pasca terpilihnya Kirchner menjadi presiden pada tahun 2003, Kirchner mengunjungi *Las Madres de la Plaza de Mayo* sekaligus *Grandmothers of Plaza de Mayo* dan menyatakan dukungannya terhadap pencarian keadilan selama periode kediktatoran.

Pada bulan Agustus 2004, pemerintah Argentina merancang undang-undang baru yang memberikan kompensasi keuangan bagi anak-anak yang dilahirkan di dalam kamp-kamp penahanan.¹³¹ Tidak sampai disitu, pada tahun 2005 Kirchner juga mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk undang-undang untuk merestorasi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Undang-undang yang telah dikeluarkan sejak 12 tahun silam ini mengatur status sipil korban penghilangan paksa (*Civil Status Law*) dan kompensasi (*Special Benefit Law*). Melalui kedua undang-undang tersebut, keluarga korban bisa mendapatkan hak-hak kompensasi dari negara sebesar kurang lebih 100 USD per bulan selama 20 tahun yang diambil dari kas negara (*state bond*).¹³² Sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi kewarganegaraan sehari-hari, para korban penghilangan bisa mendapatkan status *absence due to enforced disappearances* atau *absence on presumption of death* setelah melakukan verifikasi dengan lembaga resmi negara.¹³³ Status demikian memudahkan anggota keluarga untuk melakukan kepengurusan warisan, transaksi bisnis, hak pensiun, hak milik dan sebagainya. Status *absence due to enforced dissapearances* mensyaratkan negara untuk terus melakukan penyelidikan (*criminal investigation*) terhadap korban yang bersangkutan.

Pemimpin-pemimpin negara sebelumnya yang konservatif, abai serta mengingkari demokrasi dan HAM tidak banyak mendapat tempat pada masa pemerintahan baik Nestor Kirchner maupun Cristina Fernandez Kirchner. Pemerintahan Kedua Kirchner melakukan gebrakan radikal dalam bidang HAM ketika pada tahun 2005 otoritas hukum di Argentina membuat komitmen penuh untuk mengakhiri seluruh hukum impunitas yang terjadi di Argentina sehingga

¹³¹ Jane Jaquette, *Women and Democracy: Past, Present, Future* (Stanford University, 2000), hlm. 5

¹³² Arthur MacEwan, "The IMF and Argentina's Spiralling Crisis," diperoleh dari <http://www.foreignpolicy-infocus.org>, Internet, diakses 21 April 2011.

¹³³ Scott Muttersbaugh, "Human Rights in Argentina," <http://latinamerica/argentina.pdf+the+role+of+the+mothers+of+plaza+de+mayo+now+in+political+argentina&cd=58&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>, Internet, diakses 26 April 2011.

proses pengadilan terhadap para pelaku yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu dapat dimulai kembali.

Pada tanggal 26 Januari 2006, *Las Madres de la Plaza de Mayo* membuat laporan akhir *March of Resistance* yang berisi tentang perasaan bangga mereka akan pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez Kirchner yang sangat berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa *Dirty War*. *March of Resistance* adalah sebuah sebutan untuk upaya-upaya evaluasi yang dilakukan oleh *Las Madres de la Plaza de Mayo* dalam perjuangannya melawan ketidakadilan di Argentina. Berikut ini adalah potongan isi dari *March of Resistance*.¹³⁴

Many Argentines doubt Kirchner's ability or desire to deliver. Inflation rising and corruption charges accumulate. The vision of Argentina potencia – as strong and prosperous as every Argentine knows it could be, if only its leaders would do the right thing- seems as "potential" as it did in 1976. But two things felt firm to me: No one risks extermination now by sounding off and no one seems worried that the lists of the disappeared might lengthen again. Las Madres de la Plaza de Mayo, even those still marching, are not adding new names.

Pada pemilu 2007, Kirchner memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali. Pemilu tersebut dimenangkan oleh Cristina Fernandez Kirchner yang tidak lain adalah istrinya. Dengan semboyan *el cambio recien empieza* (perubahan baru dimulai),¹³⁵ Cristina yang mewarisi kebijakan dan keberhasilan suaminya berhasil membuktikan perekonomian di Argentina yang semakin membaik dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka 8% dan pembayara hutang luar negeri sebesar 9,5 juta USD. Keberhasilan tersebut menjadi nilai tambah bagi Cristina Fernandez untuk menjaga kontinuitas kemajuan.

Cristina secara sungguh-sungguh menuntut, mengadili dan memberikan vonis bagi para pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Pada tahun 2007, pengadilan di Argentina menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada dua orang jenderal,

¹³⁴ Argentina's President Kirchner Continues His Daring Departure from Past Practices," diperoleh dari http://www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2006/06.08_Kirchner_dist_inct.html, Internet, diakses 24 Maret 2011.

¹³⁵ Bouvard, *Op.Cit.*, hlm. 247.

yaitu Antonio Domingo Bussi dan Luciano Benjamin Menendez. Kedua orang tersebut adalah pejabat pada masa junta militer.

Seorang polisi di Spanyol berhasil menangkap mantan presiden Argentina Isabel Peron yang sedang dicari di negara asalnya dalam rangka investigasi pembunuhan pembangkang sebelum junta militer berkuasa pada 1976-1983. FEDEFAM (Federasi Organisasi Keluarga Korban Penghilangan Paksa di Amerika Latin) pada tahun 2007 mencatat sekitar 160 anggota militer sudah diadili dan 4 diantaranya berpangkat jenderal. Sedangkan sekitar 250 anggota militer lainnya masih menunggu proses pengadilan.¹³⁶

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez Kirchner telah menunjukkan adanya harapan akan terwujudnya keadilan yang menjadi perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* selama 30 tahun. Oleh karena itu, *Las Madres* merasa tidak perlu lagi melakukan aksi-aksi demonstrasi, petisi dan lain sebagainya. Aktivitas *Las Madres* pada perkembangannya menjadi lebih luas, tidak hanya dalam isu keadilan namun juga bidang-bidang sosial lain seperti kemiskinan, kesehatan dan pengangguran menjadi perhatian baru mereka. Namun *Las Madres* akan tetap melakukan aksi diam mengelilingi piramida di Plaza de Mayo setiap hari Kamis guna mengontrol pemerintah agar terus mengingat dan mengusut para pelaku yang bertanggung jawab akan pelanggaran HAM masa lalu juga untuk menolak segala bentuk ketidakadilan yang terjadi di berbagai negara.

Las Madres de la Plaza de Mayo juga tetap melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan HAM, seperti membangun sebuah universitas, toko-toko buku, perpustakaan dan pusat-pusat kebudayaan serta balai-balai kesehatan. Tujuannya adalah agar tidak melupakan bayi-bayi, anak-anak, putra-putri dan sanak keluarga mereka yang menjadi korban penghilangan dan pembantaian massal yang dilakukan oleh rezim militer serta menghasilkan generasi-generasi muda yang peduli akan keadilan.

¹³⁶ "Current Act The Mothers of Plaza de Mayo," diperoleh dari <https://webspace.utexas.edu/cmr485/www/mothers/current.html>, Internet, diakses 3 Mei 2011.

BAB 4

KESIMPULAN

Pada saat junta militer berkuasa di Argentina (1976-1983) terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Dirty War dimana terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia secara masif, mulai dari penculikan, penindasan, sampai dengan pembunuhan massal. Situasi ini jelas menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang semakin meluas. Hal inilah yang memicu terbentuknya gerakan sosial *Las Madres de la Plaza de Mayo*, sebuah gerakan sosial wanita di Argentina yang mulai beroperasi sejak 30 April 1977. Awalnya tidak ada ide secara terstruktur untuk membentuk sebuah gerakan sosial. Gerakan ini hanya sebagai usaha untuk mencari tahu letak anak dan suami mereka yang dihilangkan secara paksa oleh junta militer.

Lengkap dengan berbagai simbol dan atribut yang sederhana, kerudung kepala putih dengan bordiran nama-nama keluarga yang hilang, mereka selalu menampakkan diri di Plaza de Mayo setiap hari Kamis sore selama kurang lebih setengah jam. Lewat gerakan simbolik tersebut, jeritan hati pengalaman subjektif *Las Madres* bertransformasi menjadi suara perlawanan yang meskipun tidak terdengar, selalu mengusik eksistensi penguasa tiran di Argentina. Lambat laun, *Las Madres de la Plaza de Mayo* mulai membentuk kerjasama dengan gerakan lain, seperti *The Movement of Relatives of The Disappeared* serta membangun hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi HAM internasional. Semua yang telah dilakukan *Las Madres* pada awal perjuangannya ini membuahkan hasil. Hal ini nampak pada tahun 1980, ketika Amerika Serikat menghentikan bantuan militer dan pinjaman dana ke Argentina sebagai konsekuensi dari kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer.

Pada periode pemerintahan sipil pasca junta militer, *Las Madres* tetap konsisten dengan upaya-upayanya menekan pemerintah agar tercipta keadilan. Raul Alfonsin sebagai presiden pertama Argentina yang terpilih melalui pemilihan umum pasca junta militer, menjadikan isu penanggulangan kasus pelanggaran HAM sebagai isu utama. Upaya Alfonsin diawali dengan

membatalkan “undang-undang penenangan nasional”, yang telah disahkan junta militer tidak lama sebelum menyerahkan kekuasaan kepada rezim demokratis. Alfonsin juga membentuk CONADEP atau Komisi Nasional Orang Hilang yang kemudian bekerjasama dengan *Grandmothers of the Plaza de Mayo* untuk melakukan investigasi terhadap orang-orang yang hilang. Selama sembilan bulan CONADEP dan *Grandmothers of the Plaza de Mayo* melakukan investigasi, mereka berhasil mengumpulkan hampir 9.000 kasus penghilangan yang belum tuntas dan membuat sebuah laporan yang berjudul *Nunca Mas (Never Again)*.

Ancaman pemberontakan militer tahun 1986-1987 mendorong Alfonsin untuk mengeluarkan dua undang-undang impunitas yang disebut *La Ley de Punto Final (The Full Stop Law)* dan *La Ley de Obediencia Debida (The Law of Due Obedience)*. Sebagai reaksinya, *Las Madres* melakukan aksi demonstrasi menentang upaya untuk tidak menindaklanjuti kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa *Dirty War* ini. Bersama dengan organisasi HAM lainnya, *Las Madres* melakukan aksi demonstrasi di Plaza de Mayo untuk menuntut penghapusan dua undang-undang tersebut.

Pada tahun 1989, Carlos Menem terpilih menjadi presiden Argentina periode berikutnya. Selama masa pemerintahan Menem, ada dua tindakan besar yang dilakukan oleh *Las Madres*, yaitu mencari dukungan dari dunia internasional dan mencari pengakuan, menuntut pengadilan hukum dan penahanan para pelaku. *Las Madres* semakin fokus dalam mengeratkan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi HAM yang sudah terjalin sebelumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan tuntutan terhadap penghapusan undang-undang pengampunan pada tahun 1990-an.

Selama tahun 1999-2002 terjadi pergantian presiden yang sangat signifikan. Fernando de la Rúa menjadi presiden Argentina sejak tahun 1999, namun hanya berlangsung selama dua tahun. Selama 15 hari berikutnya, terjadi lima kali pergantian presiden di Argentina. Pada masa ini penghapusan undang-undang impunitas tetap menjadi tuntutan gerakan *Las Madres*, walaupun pemerintah Argentina sedang memfokuskan diri pada permasalahan ekonomi karena situasi yang semakin terpuruk. Hasilnya, pada tahun 2003 Kongres menghapus *The Full Stop Laws* dan *The Law of Due Obedience* dengan alasan

kedua undang-undang tersebut tidak valid. Keduanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sudah menjadi kewajiban tiap negara untuk mencegah, menyelidiki dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.

Puncak perjuangan *Las Madres de la Plaza de Mayo* nampak di bawah pemerintahan Nestor Kirchner dan Cristina Fernandez Kirchner 2003-2007). Nestor Kirchner membuat suatu agenda politik yang dinamakan “*Justice for the Crimes of the Dictatorship*”. Tidak sampai disitu, pada tahun 2005 Kirchner juga mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam bentuk undang-undang untuk merestorasi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Melalui undang-undang tersebut, keluarga korban bisa mendapatkan hak-hak kompensasi dari negara sebesar kurang lebih 100 USD per bulan selama 20 tahun yang diambil dari kas negara.

Atas apa yang telah dilakukan oleh pasangan Kirchner ini, maka pada tanggal 26 Januari 2006 *Las Madres de la Plaza de Mayo* membuat laporan akhir *March of Resistance* yang berisi tentang perasaan bangga mereka akan pemerintahan Nestor dan Cristina yang sangat berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa *Dirty War*. *March of Resistance* itu sendiri adalah sebuah sebutan untuk upaya-upaya evaluasi yang dilakukan oleh *Las Madres* dalam perjuangannya melawan ketidakadilan di Argentina.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Alexander, Robert J.. *An Introduction to Argentina*. London: Pall Mall Press, 1969.

Andersen, Martin Edwin. *Dossier Secreto: Argentina's Desaparecidos and the Myth of The Dirty War*. Colorado: Westview Press, 1993.

Billah, M.M.. *Tipologi dan Praktek Pelanggaran HAM*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2003.

Bouvard, Marguerite Guzman. *Revolutionizing Motherhood: The Mothers of The Plaza de Mayo*. Bedford, NH: Igneus Press, 1994.

Brysk, Alison. *The Politics of Human Rights in Argentina: Protest, Change, and Democratization*. California: Stanford University Press, 1994.

Burke, Peter. *History and Social Theory*. UK: Polity Press, 2005.

Cassese, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Davis, Emon. *Women History Multiple Stories*. Nijmegen: SUN, 1990.

Diani, Mario. *The Concept of Social Movement*. USA: Blackwell Publishing, 1998.

Eckstein, Susan E.. *Power and Popular Protest: Latin American Social Movements*. California: University of California Press, 1989.

Fisher, Jo. *Out of the Shadows: Women, Resistance and Politics in South America*. Latin America: BUREAU, 1993.

Jaquette, Jane. *The Women's Movement in Latin America: Feminism and Transition to Democracy*. San Fransisco: Westview Press, 1991.

Jaquette, Jane. *Women and Democracy: Latin American and central and Eastern Europe*. John Hopkins University Press, 1998.

- Jaquette, Jane. *Women and Democracy: Past, Present Future*. Stanford University, 2000.
- Jen, Yu-Wen. *The Taiping Revolutionary Movement*. London: Yale University Press, 1973.
- Johnston, Hank and Paul Almeida. *Latin American Social Movements-Globalization, Democratization, and Transnational Networks*. Rowman and Littlefield Publishers, inc., 2006.
- L., Stephen. *Gender, Citizenship and the Politics of Identity*. New York: Cambridge University Press, 2001.
- Lichtenfeld, Rebecca and Leonardo Filippini. *Accountability in Argentina, 20 years later, Transitional Justice Maintains Momentum*. New York: ICTJ, 2005.
- Locke, John. *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*. Oxford: Blackwell, 1964.
- Marsh, David and Gerry Stoker. *Theory and Methods in Political Science*. New York: St. Martins Press, 1995.
- Radcliffe, Sarah. *Women's Place/ El Lugar de Mujeres: Latin America and The Politics of Gender Identity*. London: Routledge, 1993.
- Ritchie, Jane and Jane Lewis. *Qualitative Research Practice*. London: Sage Publication, 2003.
- Robben, Antonius C.G.M.. *Death Squad-The Anthropology of State Terror*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000.
- Roddick, Jackie. *The Dance of The Millions: Latin America and the Debt Crisis*. London: Latin America Bureau, 1988.
- Ross, Ellen. *New Thoughts on the Oldest Vocation: Mothers and Motherhood in Recent Feminist Scholarship*. Winter: Signs, 1995.
- Rucht, Dieter. *Research on Social Movements, The State of the Art in Western Europe and the USA*. Frankfurt A.M.: Campus, 1991.

Schirmer, J.G.. *'Those Who die for Life Cannot be Called Dead', Women and Human Rights Protest in Latin America*. USA: Publishers' Board of Trade, 1989.

Staub, Ervin. *The Roots of Evil-The Origin of Genocide and Other Group Violence*. Cambridge University Press, 1989.

Stepan, Alfred. *Militer dan Demokratisasi: Pengalaman Brazil dan Beberapa Negara lain*. Princenton: Princeton Univesity Press, 1988.

Turner, Ralph H. and Lewis M. Killian. *Collective Behavior*. NJ: Prentice Hall, 1957.

Ubaedillah, A., *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatulah, 2006.

Varma, S.P.. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

2. JURNAL ILMIAH

"Party Systems and Electoral Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and Structural Explanations", *American Political Science Review* (1999).

"Las Madres de la Plaza de Mayo", Peranan Politik Ibu di Argentina", *Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan* (2001).

"Menolak Impunitas: Serangkaian Prinsip Perlindungan dan Pemajuan HAK ASASI MANUSIA Melalui Upaya Memerangi Impunitas Prinsip-prinsip Hak Korban", *Kontras* (2005).

3. LAPORAN

Laporan Final CONADEP (2007), *Argentina Pasca Junta Militer (1976-1983)*.
Report on the Situation of Human Rights in Argentina (1980).

4. WEBSITE

Allen, Bruce. *Argentina: The Mothers of The Plaza de Mayo*.
<http://www.labournet.net/world/0001/mum1.html>

Asrianti, Tifa. *Mothers of Plaza de Mayo: Justice for Disappeared Loved Ones, One Step at a Long Time*.

<http://www.thejakartapost.com/news/2009/04/26/mothers-plaza-de-mayo-justice-disappeared-loved-ones%C2%A0one-step-a-long-time.html>

Brown, Stephen. *Argentine Mothers Mark 20 Years Fighting Injustice*.
<http://www.mosquionet.com/~prewett/twentyyearsfight.html>

Criado, Miryam. *Mother Images in Latin American Literature*.
<http://www.hope.edu/latinamerican/motherimages.html>

Dispatch, Abejah. *The Mothers of The Plaza de Mayo: 24 Years of Rocking Argentina*.
<http://www.worldtrek.org/odyssey/latinamerica/060999/060999abejamadres.html>

Doretti, Mimi. *Equipo Argentino de Antropologia Forens (EAAF)*, Annual eport, 2002. www.eaaf.org.ar

Filippini, Leonardo. *Criminal Prosecutions for Human Rights Violation in Argentina*. <http://www.ictj.org/images/content/5/2/525.pdf>

Gaudin, Andres. *Faktor Kirchner*. <http://www.nefos.org/?q=node/30>

MacEwan, Arthur. *The IMF and Argentina's Spiralling Crisis*.
<http://www.foreignpolicy-infocus.org>

Muttersbaugh, Scott. *Human Rights in Argentina*.
<http://latinamerica/argentina.pdf+the+role+of+the+mothers+of+plaza+de+mayo+now+in+political+argentina&cd=58&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>

“Abuelas de Plaza de Mayo”
<http://www.globalministries.org/lac/projects/grandmothers-of-the-plaza-de-may.html>

“Argentina’s Modern History and Politics”
<http://www.whatargentina.com/modern-history-politics.html>

“Argentina’s President Kirchner Continues His Daring Departure from Past Practices”
http://www.coha.org/NEW_PRESS_RELEASES/New_Press_Releases_2006/06.08_Kirchner_distinct.html

“Current Act The Mothers of Plaza de Mayo”

<https://webspaces.utexas.edu/cmr485/www/mothers/current.html>

“Dark Years: Argentina’s Military Dictatorship”

<http://www.whatargentina.com/argentina-military-dictatorship.html>

“Falklands/ Malvinas War”

<http://www.globalsecurity.org/military/world/war/malvinas.htm>

“Ibu-ibu Plaza de Mayo, Argentina”

<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=las%20madres%20de%20la%20plaza%20de%20mayo%20perang%20kotor&source=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.kontras.org%2Fpers%2Fteks%2FLampiran%25202%2520Plaza%2520de%2520Mayo.pdf&ei=u1y-TvzPG9HprQedyLzfAQ&usg=AFQjCNEITrxIGvkqTXktaJciIOXtz5fYhA&sig2=aRSCInt0WoGxrjzHCMpjTA>

“International Commission Of Jurists; Amnesty International; Watch Human Rights and Correctional Argentina 2001”

<http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR130122001?open&of=ENG-2M>

“Jurnal Cutler” <http://www.gwu.edu/~uwp/fyw/euonymous/2004-2005/Cutler.pdf>

“Madres de Plaza de Mayo: Linea Fundadora”

http://www.memoriaabierta.org.ar/eng/quienes_somos.php#014

“Mothers of Plaza de Mayo a 30-year Symbol of Human Rights”

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/todaysfeatures/2007/April/todaysfeatures_April54.xml§ion=todaysfeatures

“On The Water Front”, Newsletter No. 14 of the Friends of the Irish, 2007

<http://www.iisg.nl/friends/newsletter-14.pdf>

“Social Movements Types”

<http://www.sociologyguide.com/social-change/social-movements-type.php>

“The Grandmothers of The Plaza de Mayo”

www.derechos.org/human-rights/grandmothers.html

“The Return of The State in Argentina”

http://www.chathamhouse.org.uk/files/9180_110507argentina.pdf